

**ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA DAN
DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT LOKAL
DI DESA RAPPOA KABUPATEN BANTAENG**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2025**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN

**ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA DAN
DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT LOKAL
DI DESA RAPPOA KABUPATEN BANTAENG**



*Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2025**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

**Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan
(QS. Al –Insyirah: 5-6)**

**“memang tidak selalu mudah, tapi itulah hidup, jadilah kuat karena
ada hari-hari yang lebih baik di depan”.**
(Mark Lee)

**“Jangan pernah takut mengambil keputusan dan jangan pernah
menyesali keputusan yang telah engkau ambil”**



“skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta. Kepada sosok yang selalu menjadi cahaya dalam setiap langkahku. Terima kasih atas kasih sayang yang tiada batas, doa yang tak pernah putus, dan pengorbanan yang tak terhitung nilainya. Setiap pencapaian yang kuraih adalah berkat cintah, kesabaran, dan doa kalian. Semoga hasil karya ini bisa menjadi kebanggaan sederhana untuk membalas sebagian kecil dari apa yang telah kalian berikan. Serta untuk orang-orang yang telah memberikan support untuk saya dan tak lupa untuk almamaterku kampus biru Universitas Muhammadiyah Makassar.



PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul penelitian

: Analisis Kebijakan Pengelolaan Dana Desa
Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Lokal
Di Desa Rappoa Kabupaten Bantaeng

Mahasiswa

: SITTI FAUZIAH

No. Stambuk/ NIM

: 105731119121

Program Studi

: Akuntansi

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi

: Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 30 Agustus 2025 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 30 Agustus 2025

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Syamsuddin, S.Pd., M.Ak

NIDN: 0909107902

Endang Winarsih, SE., M.Ak

NIDN: 0913029101

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi



Muhammad Khairdar Sahib, S.E., M.Ak
NBM: 1190 048#



PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: Sitti Fauziah, Nim: 105731119121 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0014/SK-Y/62201/091004/2025, Tanggal 06 Rabiul Awal 1447 H/ 30 Agustus 2025 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 06 Rabiul Awal 1447 H
30 Agustus 2025 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, S.T., M.T., IPU (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. Edi Jusriadi, S.E., M.M
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekertaris : Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji :
 1. Dr. Syamsuddin, S.Pd., M.Ak
 2. Abd. Salam, HB., SE., M.Si., AK., CA., CSP
 3. Amran, S.E., M.Ak., Ak., CA
 4. Masrullah, SE., M.AK





PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

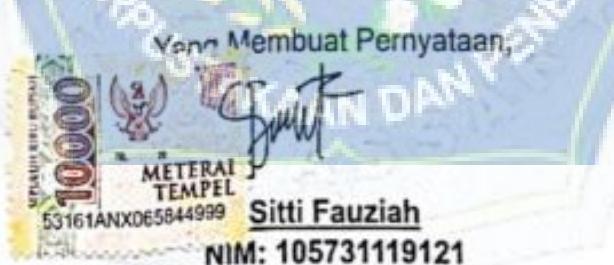
Nama Mahasiswa : SITTI FAUZIAH
NIM : 105731119121
Program Studi : Akuntansi
Judul Penelitian : Analisis Kebijakan Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Lokal Di Desa Rappoa Kabupaten Bantaeng

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 30 Agustus 2025



Diketahui Oleh:



Ketua Prodi Akuntansi

Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M.A.K
NBM: 1190 048

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITTI FAUZIAH

NIM : 105731119121

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Analisis Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap
Masyarakat Lokal Desa Rappoa Kabupaten Bantaeng**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Makassar, 30 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan,



ABSTRAK

SITTI FAUZIAH. 2025. Analisis Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Lokal Di Desa Rappoa Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus Desa Rappoa Kabupaten Bantaeng). Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh: Syamsuddin dan Endang Winarsih.

Pengelolaan Dana Desa merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Desa Rappoa, Kabupaten Bantaeng, menjadi salah satu penerima alokasi Dana Desa yang pemanfaatannya difokuskan pada pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengelolaan Dana Desa serta dampaknya terhadap masyarakat lokal di Desa Rappoa, Kabupaten Bantaeng. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Rappoa memberikan dampak positif berupa peningkatan infrastruktur desa, kualitas layanan publik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha lokal. Selain itu, program Dana Desa juga mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemui kendala berupa perubahan regulasi yang cukup sering terjadi serta keterbatasan kapasitas aparatur desa. Secara keseluruhan, pengelolaan Dana Desa di Desa Rappoa telah berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Dana Desa, Kebijakan, Partisipasi Masyarakat

ABSTRACT

SITTI FAUZIAH. 2025. *Analysis of Village Fund Management Policy and Its Impact on Local Communities in Rappoa Village, Bantaeng Regency (Case Study of Rappoa Village, Bantaeng Regency).* Thesis. Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by: Syamsuddin and Endang Winarsih.

Village Fund management is an important instrument in promoting development and improving community welfare at the village level. Rappoa Village, Bantaeng Regency, is one of the recipients of Village Fund allocations, which are utilized to support infrastructure development, public services, and community economic empowerment. This study aims to analyze the Village Fund management policy and its impact on the local community in Rappoa Village, Bantaeng Regency. The research method used is qualitative with a case study approach, conducted through interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that Village Fund management in Rappoa Village has had positive impacts, including the improvement of village infrastructure, enhancement of public service quality, and community economic empowerment through the development of local enterprises. In addition, the Village Fund program has encouraged greater community participation in the development process. However, its implementation still faces challenges such as frequent changes in regulations and the limited capacity of village officials. Overall, the management of Village Funds in Rappoa Village has contributed significantly to improving community welfare.

Keywords: Village Funds, Policy, Community Participation

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat serta salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada henti penulis limpahkan kepadanya sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini sampai pada tahap skripsi yang berjudul "Analisis Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Lokak Di Desa Rappoa Kabupaten Bantaeng".

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih tiada hentinya kepada kedua orang tua penulis bapak Syarifuddin dan ibu Sirka yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Orang-orang terdekat serta teman-teman tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, MT., IPU, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Mira, SE., M.Ak, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Syamsuddin, S.Pd.,M.Ak selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Endang Winarsih, SE.,M.Ak selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Teristimewa kepada kedua orang tua saya cinta pertama saya bapak Syarifuddin dan pintu surgaku ibu Sirka, orang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, terima kasih untuk semua doa dan dukungan bapak dan ibu, sehingga saya bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, bapak dan ibu harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup Fauziah.
Iloveyou more more more.

9. Seluruh keluarga tercinta nenek dan sepupu : terkhusus Hj. Kambe, Nur Suci Izramadhani, Abdul Syahrul, Yasmin Nurul Jannah yang telah banyak memberikan dukungan, bantuan dan doa serta hiburan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat penulis dibangku perkuliahan yang selalu membersamai dalam empat tahun ini, yaitu Riski Amalia, Sulvia, Salsabila, Putri Ayu Wandira yang banyak membantu penulis dalam mengerjakan skripsi dan tak pernah henti saling menyemangati
11. Teruntuk Fathammubiina dan Novianti Azzahra, terima kasih telah mendukung, menghibur dan mendengarkan keluh kesah penulis
12. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seorang yang istimewa yaitu Muh. Willyam yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi di setiap proses penyusunan skripsi ini.
13. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2021, terkhusus kelas AK21F dan PA21B yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis
14. Terima kasih juga teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.
15. Dan yang terakhir kepada diri saya sendiri Sitti Fauziah. Terima kasih sudah berjuang sejauh ini, terima kasih karena tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil. Namun, terima kasih tetap menjadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah mencoba, terima kasih karena

memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaiannya sebaik mungkin dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berapa cia. Apapun kurang dan lebihnya dirimu mari merayakan ndiri sendiri.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritikannya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar. Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, wassalamu'alaikum Wr. Wb

Makassar, 05 Mei 2025

Penulis

DAFTAR ISI

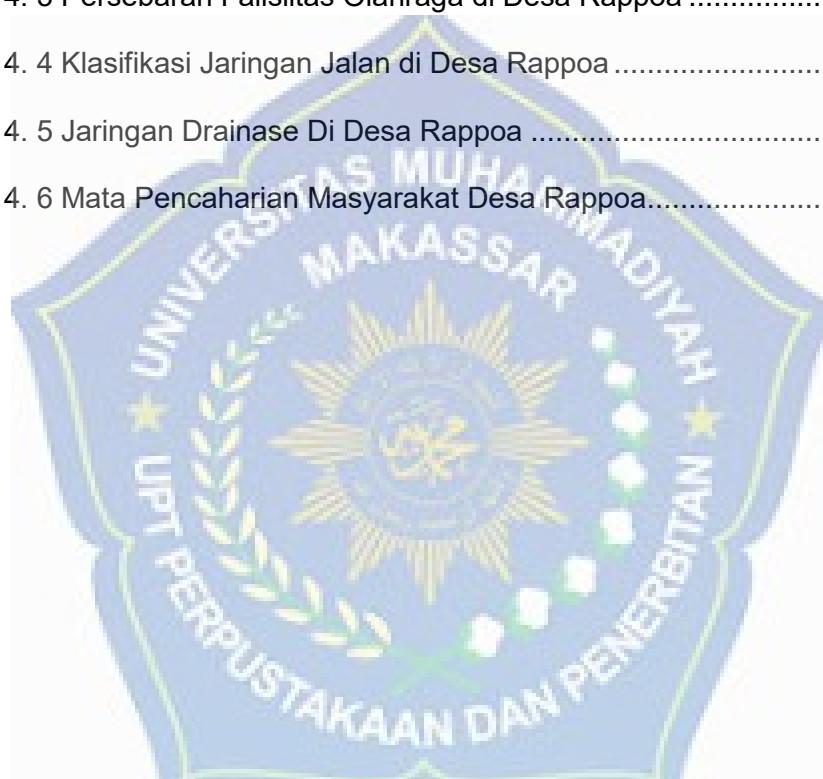
HALAMAN SAMPUL	i
KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Teori	7
B. Penelitian Terdahulu	19
C. Kerangka Pikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Lokasi dan Waktu penelitian.....	29
C. Jumlah Penduduk Desa Rappoa	30
D. Jenis dan Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31

F. Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	35
B. Hasil Penelitian.....	60
C. Pembahasan.....	69
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk.....	30
Tabel 4. 1 Penyebaran Fasilitas Perdagangan dan Jasa di Desa Rappoa	47
Tabel 4. 2 Fasilitas Peribadatan di Desa Rappoa.....	47
Tabel 4. 3 Persebaran Falisiltas Olahraga di Desa Rappoa	48
Tabel 4. 4 Klasifikasi Jaringan Jalan di Desa Rappoa	49
Tabel 4. 5 Jaringan Drainase Di Desa Rappoa	51
Tabel 4. 6 Mata Pengaharian Masyarakat Desa Rappoa.....	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir.....	28
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Rappoa	39
Gambar 4. 2 Sketsa Pengangkutan Jaringan Persampahan di Desa Rappoa ...	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep yang menjadi fokus utama dalam pembangunan diberbagai negara, termasuk indonesia. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya merupakan tujuan dalam dirinya sendiri, tetapi juga merupakan kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Di Indonesia, salah satu intrumen yang telah diperkenalkan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat di tingkat pedesaan adalah Alokasi Dana Desa (ADD). ADD merupakan alokasi dana yang diberikan kepada desa-desa diseluruh Indonesia untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa (Yulindawati, 2024)

Penetapan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjadi titik balik reformasi peranan desa dalam proses pembangunan nasional (Bender, 2016). Desa diberikan kewenangannya untuk merencanakan dan mengelola program perbangunan berbasis desa sesuai kebutuhan desa (Permatasi et al., 2021) yang diselaraskan dengan prioritas nasional. Sejalan dengan pemberian kewenangan tersebut, pemerintah pusat memberikan dukungan pendanaan melalui dana desa. Sebelum adanya dana desa, pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli desa dan alokasi dana desa (ADD) (Iqbal et al., 2021). Pendapatan asli desa bersumber dari hasil usaha, hasil kekayaan, hasil swadaya, dan partisipasi masyarakat desa, sedangkan ADD merupakan porsi dari dana perimbangan yang diterima

pemerintah kabupaten. Dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), kemudian ditambahkan dengan jumlah dan porsi yang signifikan dan menjadi sumber pendapatan desa yang utama (Sutiyono et al., 2018). Penambahan kemampuan finansial ini, jika turut didukung dengan tata kelola desa yang baik, maka akan memajukan desa menjadi mandiri (Dana & Dan, 2023)

Dana desa merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksananya pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya dana desa ini, diharapkan agar dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana, serta dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal yang didasarkan atas kondisi dan potensi desa.(Ridha Fahrul, 2019). Besarnya dana yang diperoleh desa menuntut pemerintah desa untuk dapat mengelola keuangannya dengan baik, pemerintah desa pada umumnya harus menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dan terbuka. Akuntabilitas, profesionalisme, akomodatif dan prinsip-prinsip lain dalam tata kelola pemerintahan yang baik dapat menjadi acuan pemerintah desa dalam menjalankan fungsinya.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, pemerintah daerah, baik pemerintah desa maupun kecamatan, memerlukan kontrol terhadap pengelolaan dana yang bersumber dari dana desa. Sesuai prinsip partisipatif tata kelola sistem yang akuntabel dan transparan, diperlukan peran masyarakat lokal sehingga masyarakat mempunyai pemahaman mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporannya. Lebih lanjut, pengelolaan Dana Desa wajib melalui proses pembahasan dan tetap

berpegang pada prinsip tata kelola yang baik (Potolau et al., 2024). Pemerintah dapat merencanakan, mengelola dan mengalokasikan dana desa secara lebih efektif dan efisien, sehingga dapat menghasilkan hasil pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa. Namun, dalam peraktiknya, terdapat beberapa tantangan dan permasalahan dalam pengelolaan keuangan dana desa yang mempengaruhi keberhasilan program pembangunan di desa.

Dalam rangka mencapai tujuan pengembangan desa yang berkelanjutan, pemerintah daerah dituntut untuk memperhatikan berbagai aspek yang relevan dalam pengelolaan keuangan dana desa. Seiring dengan bertambahnya tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, peran masyarakat dalam pengawasan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan juga semakin penting dan harus diakui serta diperkuat. Oleh karena itu, keberhasilan program pembangunan di desa tidak hanya bergantung pada efektifitas pengelolaan keuangan dana desa saja, tetapi pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan(Marcelleno et al., 2023).

Pengelolaan Dana Desa di Desa Rappoa, Kabupaten Bantaeng, menjadi objek penelitian yang menarik karena mencerminkan dinamika antara kebijakan pemerintah dan realitas di lapangan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa-desa di Indonesia, termasuk Rappoa, menerima alokasi dana yang signifikan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik. Namun, meskipun Dana Desa memberikan peluang besar untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi

masyarakat, tantangan seperti kurangnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana masih sering terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan pengelolaan Dana Desa di Desa Rappoa diimplementasikan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penggunaan dana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, dampak dari pengelolaan Dana Desa terhadap masyarakat lokal menjadi fokus penting dalam penelitian ini. Meskipun ada upaya melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program, tingkat partisipasi masyarakat sering kali masih rendah. Rendahnya partisipasi ini dapat mengakibatkan ketidakpuasan terhadap hasil program yang dijalankan. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana kebijakan pengelolaan Dana Desa memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dan dampaknya terhadap kualitas hidup mereka. Dengan memahami hubungan antara kebijakan, partisipasi masyarakat, dan dampak sosial ekonomi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Rappoa.

Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh (Yulindawati, 2024) efektivitas pengelolaan dana sangat dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Partisipasi aktif masyarakat terbukti tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga memastikan bahwa program-program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat setempat. ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam

meningkatkan dampak positif Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk di Desa Rappoa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana analisis kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Rappoa Kabupaten Bantaeng
2. Bagaimana dampak pengelolaan dana desa terhadap masyarakat lokal di Desa Rappoa Kabupaten Bantaeng

C. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Rappoa Kabupaten Bantaeng
2. Untuk mengetahui dampak pengelolaan dana desa terhadap masyarakat lokal di Desa Rappoa Kabupaten Bantaeng

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan tercapai oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam melakukan penelitian terkait kebijakan publik, khususnya dalam aspek pengelolaan dana desa dan dampaknya terhadap pembangunan desa serta kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar pertimbangan dalam perbaikan kebijakan pengelolaan dana desa yang berdampak pada masyarakat lokal. Masyarakat dapat memperoleh informasi tentang penggunaan dana desa dan mengetahui sejauh mana dana tersebut memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan mereka, sehingga dapat meningkatkan partisipasi aktif dalam proses pembangunan di desa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Teori Good Governance

Secara mendasar, good governance adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaanya yang dapat dipertanggung jawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Good governance pada dasarnya konsep yang merujuk pada suatu proses pembuatan keputusan dan pelaksaaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara kolektif. Kesepakatan bersama yang dicapai antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta untuk menjalankan pemerintahan suatu negara (Nurhidayat, 2023).

2. Dana Desa

Menurut Undang-Undang Republik undonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. (Panjaitan & Damanik, 2023). Dana desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka menyelenggarakan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan

kewajiban desa tersebut. Dana desa juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan desa sebagai pelaksana kewajiban desa dalam peningkatan dan perubahan bagi desa.

Desa fungsinya memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan. (Ananda Muhamad Tri Utama, 2022) Berdasarkan permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari 3 sumber yaitu :

- a. Pendapatan Asli Desa (PADes)
- b. Transfer meliputi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, bantuan keuangan dari APDB Provinsi dan kabupaten/Kota
- c. Pendapatan lain-lain meliputi hibah dan pendapatan desa yang sah.

Menurut (Panirikan, 2021) Dana desa yang bersumber dari APBN diperuntukan bagi desa ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dimulai sejak tahun 2015. Penyaluran dana desa diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan desa dengan meningkatkan pelayanan energi di desa, memajukan perekonomian desa, menutup kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai badan utama pembangunan. Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah Daerah Kabupaten/kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. 13 Sebagai dasar hukum agar belanja desa sesuai dengan prioritas pemerintah, pada tahun 2015 ditetapkan peraturan menteri desa, PDT,

Transmigrasi RI No.21 Tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016 dan permendesa No.8 Tahun 2016 penggunaan dana desa ada 4 bidang sebagai berikut:

a. Bidang pelaksanaan pembangunan desa, yang terdiri dari :

1. Pemenuhan kebutuhan dasar
 2. Sarana prasarana desa
 3. Pengembangan ekonomi lokal
 4. Pemanfaatan SDA dan lingkungan
- b. Bidang pembinaan kemasyarakatan
- c. Bidang pemberdayaan masyarakat
- d. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa

3. Tujuan Dana Desa

Tujuan dari dana desa ialah guna meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan (Ananda Muhamad Tri Utama, 2022). Sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa, bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan melalui :

- a. Penyediaan kebutuhan dasar
- b. Pengembangan saran dan prasarana
- c. Pengembangan potensi ekonomi lokal, dan
- d. Pemanfaatan SDA-Lingkungan secara berkelanjutan.

4. Alokasi Dana Desa

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa: Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Kemudian pasal penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah" adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan Sumber Daya Alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai. Dalam pasal penjelasan pula disebutkan bahwa alokasi dana desa adalah 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta 30% untuk Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyaluran melalui kas desa. ADD bersumber dari pendapatan daerah kecuali pendapatan swadana, dana perimbangan kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK) dan lain-lain. Landasan dan pemikiran dilaksanakan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 tentang Sumber Pendapatan Desa.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- c. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk penyelenggaraan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Hasil penelitian Tim Studi Alokasi Dana Desa di beberapa kabupaten menunjukkan bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Desa dapat meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
- e. Dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.
(Christho, 2020)

5. Pengelolaan

Pengelolaan dapat diartikan sebagai pelaksanaan untuk mengatur sesuatu hal atau suatu proses untuk melakukan management. Selain itu maka juga dapat dikatakan sebagai proses mewujudkan pengaturan terhadap fungsi yang membutuhkan suatu pencapaian. Pengelolaan bukan

hanya struktur organisasi tetapi juga dapat dimaksudkan ke dalam pengelolaan keuangan terutama keuangan desa. Sebagai bagian dari pemerintahan desa, maka suatu wilayah juga memerlukan pengelolaan yang terarah yang berguna untuk mewujudkan pembangunan (AIDI, 2020).

Menurut (Panirikan, 2021) pengelolaan Dana Desa dikaitkan dengan pemerintahan pusat/provinsi/kabupaten/kota, subjek pelaksanaannya didesa, struktur APB Desa, laporan serta lingkungan strategis berupa ketentuan yang mengaturnya didukung tersedianya sistem serta prosedur keuangan akan mewujudkan aktivitas pengelolaan keuangan dilakukan dengan baik.

a. Asas Pengelolaan Dana Desa

Dana Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintah yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam permendagri Nomor 223 Tahun 2014 yakni “Transparan, Akuntabel, Partisipatif serta dilakukan dengan tertib serta disiplin anggaran” dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Transparan

Dana desa diketahui oleh masyarakat serta keluar masuknya dana transparan dijabarkan oleh perangkat desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, serta adil mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan

2. Akuntabilitas

Kewajiban untuk pertanggungjawabankan pengelolaan serta pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan

dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, asas akuntabel yang telah menentukan aktivitas serta hasil akhir penyelenggaraan pemerintahan desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

3. Partisipatif

Kelembagaan desa serta unsur masyarakat desa diikutsertakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

4. Tertib serta disiplin anggaran

Landasan ataupun pedoman dalam mengelola keuangan desa harus dilaksanakan. Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa yakni :

- a) Rencana pendapatan ialah gambaran yang ternilai secara logis yang bisa didapat untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan anggaran belanja ialah batas maksimal pengeluaran belanja.
- b) Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup serta tidak dibenarkan melaksanakan aktivitas yang belum tersedia maupun tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa/perubahan APB Desa
- c) Semua penerimaan serta pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan APB Desa serta dilakukan memalui Rekening Kas Desa.(Ezquerro et al., 2024)

6. Dampak Pengelolaan Dana Desa Terhadap Masyarakat Lokal

Pengelolaan Dana Desa telah membawa berbagai dampak positif bagi masyarakat desa di Indonesia, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Ada beberapa dampak utama dari pengelolaan dana desa.

a. Peningkatan Infrastruktur Desa

Salah satu dampak terbesar dari pengelolaan dana desa adalah peningkatan infrastruktur di pedesaan, seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya. Infrastruktur yang lebih baik membantu mengurangi kesenjangan antara desa dan kota serta memudahkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, dan kesehatan hal ini juga mempercepat mobilitas dan akses pasar, yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal (Yuliawati, 2020)

b. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dana desa yang digunakan untuk program pemberdayaan ekonomi, seperti pembangunan usaha Mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pelatihan keterampilan, serta dukungan terhadap koperasi dan kelompok usaha. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan mengurangi angka kemiskinan. Pemberdayaan ini juga menciptakan lapangan kerja baru di sektor-sektor produktif, baik melalui pembangunan fisik maupun kegiatan ekonomi berbasis masyarakat (Yuliawati, 2020).

c. Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Pengelolaan dana desa berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan publik di desa, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan,

dan sanitasi. Pembangunan infrastruktur yang didukung oleh dana desa telah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup(Lase, 2021).

d. Peningkatan Kesadaran Partisipatif

Program dana desa telah mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa mereka. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa untuk merancang program dan lokasi dana menjadi lebih intensif, sehingga masyarakat merasa memiliki kontrol atas pembangunan yang terjadi di desa (Ulul farihin, 2023).

e. Penguatan Kelembagaan Desa

Dana desa juga memperkuat kapasitas kelembagaan desa, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan secara partisipatif. Pengelolaan yang akuntabel dan transparan mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, serta menciptakan tata kelola yang lebih (Yuliawati, 2020).

f. Dampak Sosial dan Lingkungan

Selain dampak ekonomi dan infrastruktur, pengelolaan dana desa juga berperan dalam memperkuat solidaritas sosial dan melestarikan lingkungan hidup. Beberapa desa menggunakan dana tersebut untuk program konversi lingkungan, penghijauan dan manajemen sumber daya alam yang berkelanjutan(Permatasari, 2021).

7. Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa

a. Perencanaan dan Pengelolaan

Partisipasi masyarakat merupakan komponen penting dalam perencanaan dan pengelolaan dana desa, yang bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga desa. Bentuk partisipasi masyarakat dalam konteks ini meliputi beberapa aspek utama:

1. Musyawarah desa adalah salah satu bentuk partisipasi yang paling umum. Musyawarah desa melibatkan pertemuan antara pemerintah desa dan warga untuk mendiskusikan rencana pembangunan, prioritas penggunaan dana, dan masalah-masalah lokal. Dalam forum ini, masyarakat dapat memberikan masukan dan saran tentang proyek-proyek yang perlu diutamakan, sehingga keputusan yang diambil lebih representatif dan memenuhi kebutuhan komunitas.
2. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) melibatkan partisipasi aktif masyarakat. RKPDes adalah dokumen perencanaan tahunan yang menyusun prioritas dan alokasi dana desa. Proses penyusunannya melibatkan konsultasi dengan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan feedback mengenai proyek-proyek yang akan dilaksanakan, memastikan bahwa rencana tersebut sesuai dengan kebutuhan lokal dan mendapatkan dukungan dari warga.
3. Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan proyek dana desa merupakan bentuk partisipasi yang penting. Warga desa sering dilibatkan dalam kegiatan seperti pembangunan infrastruktur atau pelaksanaan program pemberdayaan. Partisipasi ini tidak hanya

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkontribusi langsung dalam proses pembangunan dan merasakan manfaat dari hasilnya.

4. Pengawasan dan evaluasi oleh masyarakat juga merupakan bentuk partisipasi yang krusial. Masyarakat berperan dalam memantau penggunaan dana desa dan mengevaluasi pelaksanaan proyek-proyek. Pengawasan ini memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan rencana dan meminimalkan risiko penyalahgunaan. Masyarakat dapat melaporkan ketidakberesan dan memberikan masukan untuk perbaikan di masa depan.

Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan dana desa mencakup musyawarah desa, penyusunan RKPDes, pelibatan dalam pelaksanaan proyek, serta pengawasan dan evaluasi. Bentuk-bentuk partisipasi ini membantu memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan dana(Deviana, 2024).

b. Keberhasilan Program

Partisipasi masyarakat dalam program pembangunan dan pengelolaan dana desa memainkan peran krusial dalam menentukan keberhasilan suatu program. Dampak dari partisipasi ini dapat terlihat dalam beberapa aspek penting:

1. Peningkatan relevansi dan efektivitas program adalah dampak langsung dari partisipasi masyarakat. Ketika masyarakat terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, mereka dapat

memberikan informasi yang lebih akurat mengenai kebutuhan dan prioritas lokal. Ini memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan harapan dan kebutuhan nyata masyarakat, sehingga meningkatkan efektivitas dan relevansi program.

2. Tingkat keberhasilan program meningkat berkat dukungan dan keterlibatan aktif masyarakat. Partisipasi masyarakat seringkali mendorong rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap program. Dengan terlibat langsung dalam proses, masyarakat lebih cenderung untuk mendukung dan berkontribusi pada pelaksanaan program, yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan keberhasilan program tersebut.
3. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program juga diperkuat oleh partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi program mengurangi risiko penyalahgunaan dan memastikan penggunaan sumber daya yang efektif. Masyarakat yang aktif memantau pelaksanaan program dapat memberikan umpan balik yang berguna dan menyoroti masalah potensial sebelum berkembang menjadi isu yang lebih besar.
4. Pengembangan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat merupakan hasil positif dari partisipasi dalam program. Proses partisipasi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk belajar dan mengembangkan keterampilan baru, meningkatkan kapasitas lokal dalam manajemen proyek, dan memberdayakan mereka untuk lebih aktif dalam pengambilan keputusan di masa depan. Ini

berkontribusi pada pembangunan komunitas yang lebih mandiri dan resilien.

Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan program dengan meningkatkan relevansi dan efektivitas, memperkuat dukungan dan keterlibatan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memberdayakan masyarakat. Melalui partisipasi aktif, program-program dapat dijalankan lebih efektif, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan mencapai hasil yang lebih baik.

B. Penelitian Terdahulu

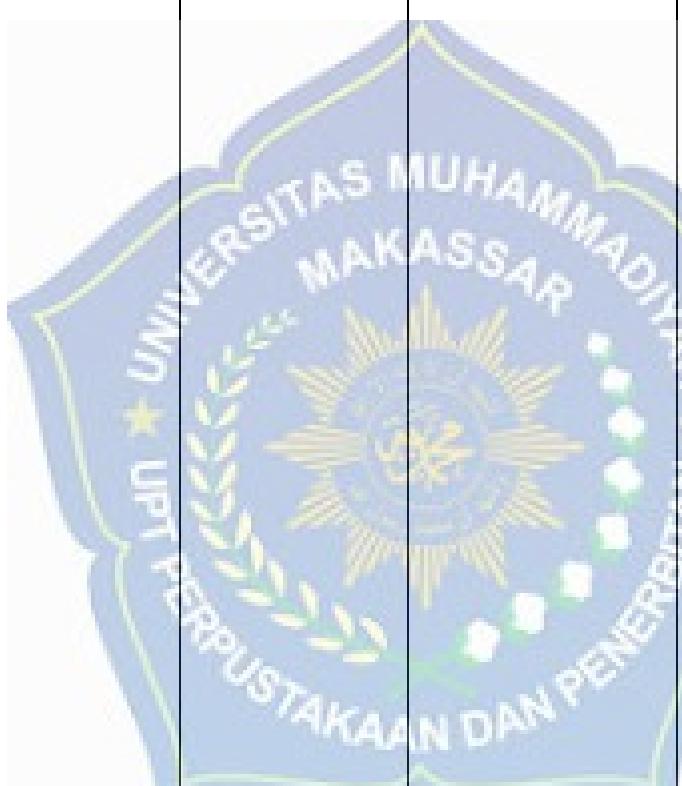
Dibawah ini merupakan tabel penelitian terdahulu yang dijadikan acuan penulis dalam penelitian ini dan digunakan peneliti dalam menentukan variabel penelitian.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti Dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Yulindawati, (2024)	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dampaknya terhadap Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus di Desa Panton, Kecamatan Teunom, Aceh Jaya	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan terkait, observasi partisipatif, dan analisis dokumen terkait.	Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Panton telah memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut digunakan secara efektif untuk mengembangkan infrastruktur, layanan publik, dan program-program pembangunan lainnya yang memberdayakan masyarakat setempat. Namun demikian, masih terdapat

				tantangan dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan ADD.
2.	(Ridha Fahrul, 2019)	Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dikecamatan Langsa Kota Langsa	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menemukan bahwa Pengelolaan Dana desa selama ini telah berjalan dengan efektif, walaupun pengalokasianya belum 100%efektif.Upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu dengan melakukan pemberdayaan antara lain di bidang infrastruktur, pemberdayaan di bidang umum dan keagamaan. Pemberdayaan pada bidang infrastruktur adalah dengan adanya pembuatan parit, jalan, pembuatan jaring ikan atau jala dan pembuatan kue serta bordir untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang umum dan keagamaan.
3.	Potolau et al., (2024)	Analisis Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Sorong	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap pemangku	Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiga desa tersebut memiliki kesamaan dalam pendekatan alokasi dana berdasarkan jumlah penduduk dan berfokus pada

			<p>kepentingan, dan observasi pastisipatif di lokasi penelitian yaitu di Desa Maibo, Desa Kasih dan Desa Aimo.</p> 	<p>berbagai program pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Musyawarah kampung menjadi platform partisipasi masyarakat dalam perencanaan program. Pengawasan program dilakukan oleh perwakilan masyarakat, perangkat desa, dan inspektorat. Meskipun praktek-praktek ini mencerminkan upaya positif dalam pengelolaan Dana Desa, evaluasi berkala, pengembangan kapasitas masyarakat, dan komunikasi yang efektif dengan masyarakat perlu ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas penggunaan Dana Desa.</p>
4.	Panjaitan & Damanik, (2023)	Analisis Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Bah Damar Kecamatan Dolok Merawan	<p>Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa analisis deskriptif jenis kuantitatif. Menurut (Saragih et al., 2021) metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa Bahdamar Kecamatan Dolok Merawan. Hal ini diperkuat dan didukung dari nilai sig. ($0,000 < 0,05$)</p>

			<p>digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan</p> 	<p>dan diperoleh thitung > ttabel (11,183 > 1,68830). Maka hipotesis yang menyatakan secara parsial pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Bahdamar Kecamatan Dolok Merawan dapat diterima. Adapun dampak dari pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa Bahdamar Kecamatan Dolok Merawan itu sendiri adalah apabila pengelolaan dana desa semakin baik maka dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat akan baik begitu pula sebaliknya apabila pengelolaan dana desa semakin buruk atau kurang baik maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan menurun.</p>
5.	ANANDA MUHAMAD TRI UTAMA (2022)	Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Cilellang Kecamatan Mallusetai Kabupaten Barru	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa Bahdamar Kecamatan Dolok	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa Bahdamar Kecamatan Dolok Merawan. Hal ini diperkuat dan

			Merawan. Hal ini diperkuat dan didukung dari nilai sig. ($0,000 < 0,05$) dan diperoleh thitung > ttabel ($11,183 > 1,68830$). Maka hipotesis yang menyatakan secara parsial pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Bahdamar Kecamatan Dolok Merawan dapat diterima. Adapun dampak dari pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa Bahdamar Kecamatan Dolok Merawan itu sendiri adalah apabila pengelolaan dana desa semakin baik maka dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat akan baik begitu pula sebaliknya apabila pengelolaan dana desa semakin buruk atau kurang baik maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan menurun.	didukung dari nilai sig. ($0,000 < 0,05$) dan diperoleh thitung > ttabel ($11,183 > 1,68830$). Maka hipotesis yang menyatakan secara parsial pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Bahdamar Kecamatan Dolok Merawan dapat diterima. Adapun dampak dari pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa Bahdamar Kecamatan Dolok Merawan itu sendiri adalah apabila pengelolaan dana desa semakin baik maka dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat akan baik begitu pula sebaliknya apabila pengelolaan dana desa semakin buruk atau kurang baik maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan menurun.
6.	Panirikan, (2021)	Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama: proses pengelolaan ADD

		Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Desa Raku Kecamatan Tabukan Utara	metode penelitian deskriptif kualitatif, cara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: observasi, wawancara, serta dokumentasi.	meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh pemerintah desa Raku Kecamatan Tabukan Utara telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam perundang-undangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yaitu partisipasi masyarakat, sarana dan prasarana. Sedangkan faktor penghambat yaitu sumber daya manusia, petunjuk teknis pengelolaan ADD yang setiap tahun berubah dan komunikasi
7.	Nurhidayat, (2023)	Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia	penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Good Governance membantu mengintegrasikan anatar peran pemerintah, privat sector, dan masyarakat untuk mencapai konsesus bersama, dimana dalam pelaksanaannya dapat di

				<p>pertanggungjawabkan dan bersifat efektif dan efisien. Dengan memperhatikan nilai-nilai dan cara kerja good governance, Good governance merupakan wujud penyampaian pertanggungjawaban dari para penerima amanah kepada pemberi amanah belum memuaskan bilamana kesadaran tentang bagaimana pentingnya menerapkan prinsip-prinsip good and clean governance dan kebutuhan bagi penyelenggara negara maka korupsi, nepotisme dan penyimpangan-penyimpangan lainnya dapat diminimalisir. Pemerintah juga bisa dikatakan baik apabila pembangunannya dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minimal namun dengan hasil maksimal</p>
8.	(Rika Widianita, 2023)	Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Maiwa Kabupaten Enrekang Terhadap Keberadaan PT. Perkebunan Nusantara XIV Perspektif	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dimana informan penelitian yaitu pihak pengelolah PT. Perkebunan Nusantara XIV di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, dan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Keberadaan PT. Perkebunan Nusantara XIV di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang memberikan dampak sosial ekonomi berupa meningkatnya pendapatan masyarakat,

		<p>Ekonomi Islam juga kepada pihak-pihak masyarakat di Kecamatan Maiwa terkait dengan adanya dampak sosial ekonomi keberadaan PT. Perkebunan Nusantara XIV di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.Pada saat pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menganalisis data peneliti menggunakan teknik analisis koding</p>	<p>memberikan kesejahteraan pada masyarakat, bertambahnya jumlah penduduk, menyerap tenaga kerja, dan berkembangnya struktur ekonomi, hal tersebut dikarenakan kehadiran PT. (2) Perspektif ekonomi Islam terhadap dampak yang ditimbulkan oleh PT. Perkebunan Nusantara XIV di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang yaitu tauhid, memberikan kemaslahatan, dan memberikan kehidupan yang sejahtera. Tetapi tidak memberikan sikap bertanggung jawab dan tidak berlaku adil.</p>	
9.	SILITONGA, (2024)	<p>Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan)</p>	<p>Metode ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivism dan digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, cara pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat statistik/kuantitatif,</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Alokasi Dana Desa, dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembangunan Desa Di Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan. Dengan hasil ini diharapkan desa Sei Lama diharapkan melakukan pemekaran.</p>

			dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah dipilih penulis dalam penelitian	
10.	AIDI, (2020)	Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar	<p>Aparatur pemerintah desa belum mampu menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dengan baik. Hal ini terjadi karena masyarakat sendiri tidak memiliki akses terhadap informasi, khususnya berkaitan dengan peran dan fungsi pemerintah desa serta program-programnya. Masyarakat juga segan dengan birokrasi pemerintahan. Kurangnya pengetahuan warga masyarakat tentang peran dan fungsi pemerintah desa, ketidaktahuan program pemerintah desa, dan ketidaktahuan tentang kebutuhan mereka berkaitan dengan pemerintah telah menjadikan warga masyarakat tidak memiliki cukup kontrol terhadap tugas-tugas yang di jalankan oleh pemerintah desa</p>	<p>Aparatur pemerintah desa belum mampu menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dengan baik. Hal ini terjadi karena masyarakat sendiri tidak memiliki akses terhadap informasi, khususnya berkaitan dengan peran dan fungsi pemerintah desa serta program-programnya. Masyarakat juga segan dengan birokrasi pemerintahan. Kurangnya pengetahuan warga masyarakat tentang peran dan fungsi pemerintah desa, ketidaktahuan program pemerintah desa, dan ketidaktahuan tentang kebutuhan mereka berkaitan dengan pemerintah telah menjadikan warga masyarakat tidak memiliki cukup kontrol terhadap tugas-tugas yang di jalankan oleh pemerintah desa</p>

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian dan Tinjauan Pustaka maka disusunlah kerangka penelitian yang dalam hal ini memiliki struktur sebagai berikut



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif.

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis kebijakan pengelolaan dana desa serta dampaknya terhadap masyarakat lokal di Desa Rappoa. penelitian ini menitikberatkan pada pemahaman mendalam mengenai proses pengelolaan dana desa dan dampak yang ditimbulkan melalui pengumpulan data lapangan dan wawancara ke berbagai pihak yang terkait.

B. Lokasi dan Waktu penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Rappoa, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini diperkirakan dalam jangka waktu kurang lebih 2 bulan, mulai dari bulan Februari 2025 - Maret 2025. Selama waktu 2 bulan ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang relevan agar dapat diolah dan diteliti kemudian dievaluasi hasilnya.

C. Jumlah Penduduk Desa Rappoa

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk

No.	Dusun	Jumlah KK	Jumlah penduduk		
			L	P	Jumlah
1.	Boddong	93	157	163	320
2.	Rappoa	168	280	268	548
3.	Sapa-sapa	67	104	129	233
4.	Tonrokassi	114	174	180	354
5.	Kampong Toa	68	115	118	233
TOTAL		510	830	858	1688

Sumber: Profil Desa Rappoa (2025)

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya melalui kegiatan pengumpulan data lapangan. Data ini mencakup informasi dan pendapat yang diberikan oleh responden yang terlibat dalam pengelolaan dan penerima manfaat dari dana desa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang sudah ada. Data ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat analisis yang dilakukan dalam penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber Data Primer

1. Perangkat Desa: Seperti kepala desa dan perangkat lainnya yang terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan dana desa. Mereka akan memberikan informasi tentang prosedur pengelolaan dana desa dan kendala yang dihadapi
2. Tokoh Masyarakat: Individu yang dianggap memiliki peran penting dalam pembangunan desa, serta padangannya mengenai dampak kebijakan dana desa terhadap masyarakat.
3. Masyarakat Desa Rappoa: Warga yang merasakan dampak langsung dari kebijakan dan program-program yang didanai oleh dana desa, termasuk penerima manfaat program pemberdayaan, pembangunan, infrastruktur, dan lainnya.

b. Sumber Data Sekunder

1. dokumen Resmi : Berbagai dokumen yang terkait dengan penggunaan dana desa, seperti laporan tahunan, peraturan desa, dan anggaran.
2. Literatur akademik : referensi teoritis yang diambil dari buku, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik pengelolaan dana desa.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer secara langsung dari responden yang terlibat dalam pengelolaan dana desa serta masyarakat yang merasakan dampak dari kebijakan tersebut. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur, dimana peneliti memiliki panduan pertanyaan, memberikan ruang bagi responden untuk menjelaskan secara lebih rinci dan bebas mengenai topik. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada Kepala Desa, Sekertaris, Bendahara, Kabid Pembangunan dan Beberapa Masyarakat.

2. Observasi Lapangan

Observasi dilakukan dengan cara mengambil langsung penggunaan dana desa di lapangan, khusunya pada proyek-proyek pembangunan fisik dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Desa Rappoa.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber tertulis. Dokumen-dokumen yang dikaji meliputi:

- a. Laporan Keuangan Desa: laporan penggunaan dana desa, laporan pelaksanaan APBDes, serta laporan pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh dana desa.
- b. Notulen Musyawarah Desa: catatan hasil musyawarah desa yang menunjukkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan penggunaan dana desa dan menentukan prioritas pembangunan desa.
- c. Peraturan Terkait Dana Desa: mengkaji regulasi yang mengatur pengelolaan dana desa, seperti Undang-Undang Desa dan peraturan pemerintah yang terkait.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dekriptif kualitatif. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dianalisis dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kebijakan pengelolaan dana desa dan dampaknya terhadap masyarakat Desa Rappoa. Proses analisis data ini dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut(Soekanto, 1986).

1. Reduksi Data

Tahap pertama dalam melakukan analisis data adalah reduksi data, yaitu proses menyederhanakan, merangkum dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam tahap ini, data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dipilih berdasarkan kategori-kategori yang sudah ditentukan, misalnya proses pengelolaan dana desa, kendala yang dihadapi dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Data yang tidak relevan akan diabaikan, sementara itu data yang penting akan disusun secara sistematis untuk dianalisis lebih lanjut.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, selanjutnya adalah penyajian data. Data yang telah disederhanakan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif,tabel atau diagram yang memudahkan peneliti untuk memahami dan mengambil kesimpulan.penyajian data membantu peneliti untuk melihat pola-pola dan hubungan antar variabel yang muncul dalam pengelolaan dana desa serta dampaknya terhadap masyarakat.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir dalam teknik analisis data adalah menyimpulkan dan verifikasi. Peneliti akan membuat kesimpulan sementara berdasarkan

hasil; analisis awal. Kesimpulan ini kemudian diverifikasi melalui proses trigulasi dengan membandingkan data dari berbagai sumber (misalnya, data dari wawancara perangkat desa, hasil observasi dan dokumen resmi). Jika terdapat kesesuaian, maka kesimpulan dapat dianggap valid; jika terdapat ketidak sesuaian, maka diperlukan analisis ulang atau tambahan data.

4. Trigulasi Data

Untuk memastikan keabsahan dan validasi data, penelitian ini menggunakan metode trigulasi, yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber atau metode pengumpulan data yang berbeda. Trigulasi dilakukan melalui :

a. Trigulasi Sumber

Membandingkan data dari wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Misalnya, hasil wawancara dengan perangkat desa akan dibandingkan dengan dokumen laporan penggunaan dana desa untuk memastikan konsistensi informasi.

b. Trigulasi Metode

Membandingkan hasil yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data (wawancara, observasi dan dokumentasi) untuk menemukan kesamaan atau perbedaan yang dapat memperkuat analisis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat

Desa Rappoa resmi terbentuk pada tahun 1997 sebagai hasil pemekaran Desa Biangkeke menjadi sepuluh desa. Pada awal berdirinya, Desa Rappoa dipimpin oleh Drs. Muh. Rusdi Idris yang menjabat hingga tahun 1999, saat desa ini berstatus definitif. Salah satu warisan penting dari masa kepemimpinannya adalah pembangunan Kantor Desa yang hingga kini masih digunakan sebagai pusat pelayanan masyarakat. Memasuki tahun 2004, Desa Rappoa menggelar pemilihan kepala desa secara demokratis dan menghasilkan Ilham Canning, ST sebagai kepala desa kedua. Di bawah kepemimpinannya, struktur wilayah desa mengalami perubahan penting, yaitu pemekaran dari tiga menjadi lima dusun pada tahun 2008 dengan penambahan Dusun Kampong Toa dan Dusun Sapa-sapa. Pada periode ini pula penataan kelembagaan desa mulai berkembang lebih terarah.

Tahun 2009 menjadi awal kepemimpinan Irwan Darfin sebagai kepala desa ketiga. Kepemimpinan ini membawa Desa Rappoa semakin dikenal luas, tidak hanya di tingkat Kabupaten Bantaeng, tetapi juga di Provinsi Sulawesi Selatan bahkan secara nasional. Salah satu langkah strategis yang dilakukannya adalah menggagas penerapan Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, dengan fokus pada

penguatan partisipasi masyarakat, transparansi anggaran, dan akuntabilitas.

Pencapaian penting lainnya terjadi pada tahun 2011 ketika Desa Rappoa dipercaya menjadi tuan rumah Festival Kemandirian Desa Kawasan Indonesia Timur yang dihadiri desa-desa dampingan ACCESS AUSAID serta perwakilan desa dari Pulau Jawa. Acara ini juga membahas Rancangan Undang-Undang Desa yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Kehadiran tokoh nasional seperti Ahmad Muqoam, Budiman Sudjatmiko, dan Ibnu Mundzir semakin menegaskan posisi Desa Rappoa sebagai contoh praktik pemerintahan desa yang inovatif dan partisipatif.

2. Kondisi Geografis

a. Letak Geografis

Desa Rappoa adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan Pa'jukukang, yang terletak dibagian selatan kabupaten Bantaeng dengan jarak + 3 km dari kota Bantaeng, luas wilayah + 3,4 Km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara: Desa Biangloe
2. Sebelah Timur: Desa Lumpangan
3. Sebelah Selatan: Laut Flores
4. Sebelah Barat: Kelurahan Lamalaka

b. Administrasi Desa

Pusat pemerintahan Desa Rappoa terletak di Dusun Boddong, Secara administrasi Desa Rappoa memiliki 5 dusun 11 RT (Rukun Tetangga), sebagai berikut :

1. Dusun Boddong membawahi 2 RT
2. Dusun Rappoa membawahi 3 RT
3. Dusun Kampong Toa membawahi 2 RT
4. Dusun Sapa-Sapa membawahi 2 RT
5. Dusun Tonrokassi membawahi 2 RT

Setiap dusun mempunyai kepala Dusun dan RT (Rukun Tetangga) yang diketuai oleh ketua RT (Rukun Tetangga). Sistem pemerintahannya yakni, camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan desa dan kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui camat, kepala BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawaban, meskipun sudah diberikan peluang kepada masyarakat untuk memberikan keterangan yang lebih lanjut.

c. Topografi

Desa Rappoa mempunyai kondisi daerah yang datar dengan ketinggian 250 Meter dari pemukiman laut.

d. Klimatologi

Iklim Desa rappoa pada umumnya memiliki suhu rata-rata berkisar antara 22° C sampai 35°C dengan tingkat curah hujan 65 mm/tahun. Curah hujan terbilang sedang dan terdapat 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan dimulai pada bulan-bulan desember sampai februari dan digunakan masyarakat petani

untuk menanam tanaman jangka pendek seperti padi, jagung, dan juga rumput laut bagi petani rumput laut. Musim kemarau terjadi pada bulan maret sampai november, pada musim ini petani biasa juga menanam palawija (kacang tanah, kedelai, jagung, dan kacang hijau) dan bagi rumput laut masih melakukan pembibitan

e. Hidrologi Dan Tata Air

Untuk memenuhi kebutuhan akan air, Desa Rappoa menggunakan 2 sumber air yaitu dari PDAM (PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM) (Perusahaan daerah Air Minum) dan sumur biasa. Pemenuhan air untuk lahan pertanian bersumber dari air hujan dan mata air Palappa yang berasal dari kampung Bonto-bonto. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih sehari-hari Masyarakat Desa Rappoa menggunakan PDAM (PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM) (Perusahaan daerah Air Minum) karena Selama 5 tahun terakhir Pemerintah Desa setiap Tahunnya melaksanakan Program pengadaan Bak penempungan Air Bersih. Di Desa Rappoa juga terdapat satu sumber mata air yang disebut dengan nama Bungun Rappoa yang airnya cukup jernih dan layak dikonsumsi oleh masyarakat khususnya di Dusun kampong Toa.

3. Visi dan Misi

a. Visi

“menjadikan desa Rappoa sebagai desa mandiri seutuhnya dan bermartabat, religius, dan terdepan dengan kemuliaan bersama”

b. Misi

1. Mengembangkan kelembagaan pemerintahan desa yang baik, amanah, dan demokratis.
2. Mendorong dan memfasilitasi tumbuh kembangnya kelembagaan dan keberdayaan masyarakat pada semua bidang kehidupan dengan memberikan perhatian seksama kepada pembangunan perekonomian desa tang memicu pertumbuhan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.
3. Memfasilitasi pengembangan kapasitas setiap penduduk desa agar mampu meningkatkan produktivitasnya secara berkesinambungan serta mampu menyalurkan pendapat dan aspirasinya pada semua bidang kehidupan secara bebas dan mandiri.

4. Stuktur Organisasi



Gambar 4. 1Struktur Organisasi Pemerintah Desa Rappoa

Struktur organisasi pemerintah Desa Rappoa terdiri dari berbagai elemen yang memiliki tugas dan fungnsinya masing-masing dalam menjalankan roda pemerintah desa. Berikut adalah tugas pokok dari masing-masing unsur dalam struktur organisasi tersebut:

a. Kepala Desa

Sebagai pemimpin tertinggi di desa, Kepala Desa memiliki tugas utama untuk:

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Menjalankan kebijakan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Memimpin dan mengoordinasikan perangkat desa dalam menjalankan tugasnya.
4. Menyusun dan menetapkan kebijakan pembangunan desa melalui musyawarah desa.
5. Menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat desa.

b. Sekertaris Desa

Sekertaris desa bertanggung jawab dalam bidang administrasi

dan tata kelola pemerintahan desa, dengan tugas :

1. Mengelola administrasi umum, surat-menurut dan arsip desa.
2. Menyusun dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
3. Mengoordinasikan tugas-tugas perangkat desa lainnya.

4. Menyusun laporan pertanggung jawaban pemerintah desa kepada pihak berwenang.
- c. Kepala Urusan (Kaur)

Perangkat desa yang bertugas dalam bidang administrasi dan pelayanan masyarakat, terdiri dari beberapa bagian :

1. Kaur Keuangan
 - a) Mengelola keuangan desa dan menyusun laporan keuangan desa.
 - b) Mencatat pemasukan dan pengeluaran desa sesuai APBDes.
 - c) Melaksanakan sistem akuntansi desa yang transparan dan akuntabel.
2. Kaur Umum dan Perencanaan
 - a) Menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai RPJMDes.
 - b) Mengelola administrasi desa seperti inventaris aset dan dokumentasi kegiatan.
 - c) Membantu dalam penyusunan laporan tahunan desa.
- d. Kepala Seksi (Kasi)

Bagian teknis dalam pemerintahan desa yang bertugas dalam pelayanan kepada masyarakat, terdiri dari beberapa bagian:

1. Kasi Pemerintahan
 - a) Membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - b) Mengurus administrasi kependudukan, seperti KTP,KK, dan surat keterangan lainnya.

c) Mengoordinasikan kegiatan di tingkat dusun dan RT/RW.

2. Kasi Kesejahteraan

a) Bertanggung jawab atas program kesejahteraan sosial di desa.

b) Mengelola bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat.

c) Mengoordinasikan program kesehatan, pendidikan dan ketenaga kerjaan di desa.

3. Kasi Pelayanan

a) Memberikan layanan administratif kepada masyarakat

b) Mengoordinasikan kegiatan sosial kemasyarakatan.

c) Membantu dalam penyelenggaraan acara desa dan pelayanan publik lainnya.

e. Kepala Dusun

Setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang bertugas:

1. Membantu kepala desa dalam melaksanakan pemerintahan desa di tingkat dusun

2. Menyampaikan aspirasi masyarakat dusun kepada pemerintah desa

3. Mengawasi pelaksanaan pembangunan dan ketertiban di wilayahnya.

f. Badan Musyawarah Desa (BPD)

Sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa, BPD (Badan Musyawarah Desa) memiliki tugas utama untuk:

1. Mengawasi kinerja pemerintah desa dan penggunaan anggaran desa.
 2. Menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa.
 3. Menyusun dan mengesahkan peraturan desa bersama kepala desa.
- g. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD, PKK, Karang Taruna, Dll)

Lembaga ini berfungsi sebagai mitra pemerintah desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa tugasnya meliputi:

1. LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), mengembangkan program pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.
2. PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), mengelola program kesejahteraan keluarga, pendidikan anak, dan kesehatan ibu.
3. Karang Taruna, meningkatkan peran pemuda dalam kegiatan sosial dan pembangunan desa.

5. Demografi dan Sosial Budaya Masyarakat

a. Demografi

1. Sarana (Fasilitas Umum)

a) Sarana Pemerintahan

Desa rappoa terdapat 2 fasilitas perkantoran yaitu Kantor Desa Rappoa dan Balai Benih Perikanan Kecamatan yang keduanya terletak di Dusun Rappoa, Desa Rappoa

b) Sarana Kesehatan

1) Poskesdes (Pos Kesehatan Desa)

Sarana kesehatan umum sudah memadai karena desa sudah memiliki 1 unit puskesdes (Pusat Kesehatan Masyarakat/puskesmas) dengan tenaga medis 2 orang bidan Sri Wahyuni Mansur A.Md,Kebdan Harisa, A.Md.Keb yang melayani 5 dusun. Bagi BUMIL yang akan melahirkan biasanya dibantu oleh bidan. Bagi masyarakat yang sakit biasanya berobat di Puskesmas Kassi-kassi yang jaraknya ±5 KM dari Desa Rappoa.

2) Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu)

Terdapat 1 posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) permanen di Dusun Tonrokassi dan sedang diusulkan 2 posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) permanen lagi di dusun lain. Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) ini memiliki 15 kader terlatih yang senantiasa mengikuti pelatihan demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya bagi ibu hamil dan balita yang rutin dilakukan sebulan sekali. Kegiatannya antara lain, imunisasi, penimbangan balita, penyuluhan kesehatan dan sweping.

c) Sarana Pendidikan

1) Play group

1 unit play group bernama "Bina Bakti" terletak di dusun Kampong Toa. Sekolah yang muridnya berusia 3-5 tahun.

2) SD

Terdapat 1 Unit Sekolah Dasar 41 Rappoa yang terletak di poros jalan provinsi di Dusun Rappoa dengan jumlah siswa total 200 orang Laki-laki 97 orang dan Perempuan 103 orang. Guru PNS 11 orang, Sukarela 6 orang, bujang sekolah 1 orang dan satpam 1 orang, total 19 orang (3 laki-laki dan 16 perempuan)

3) Madrasah Diniyah, Taqmiliyah, Awaliyah Rappoa

1 Unit sekolah MADIN yang terletak di dusun Rappoa dengan kepala sekolah bernama madrasa Ibtidaiyah Muhammadiyah Rappoa, dengan sarana terdiri dari 4 ruangan, 3 ruangan kelas dan 1 ruangan kantor.

4) Taman Kanak-Kanak

Terdapat 1 Unit sekolah taman kanak-kanak Aisiyah yang terletak di dusun Sapa-sapa. Jumlah siswa total 27 orang, laki-laki 12 dan perempuan 15 orang. Terbagi menjadi 2, kelas A (laki-laki 8 dan perempuan 4 orang) dan kelas B (laki-laki 7 dan perempuan 8 orang) .Kepala

Sekolah bernama Sulaeha, S.Pada dan mempunyai 6 orang guru perempuan yang senantiasa mendampingi murid-murid dalam kegiatan belajar mengajar.

5) Keaksaraan Fungsional

Terdapat pula 10 kelompok belajar buta aksara yang disebut KF (Keaksaraan Fungsional).kelompok belajar ini belum memiliki sarana tempat dan fasilitas yang

permanen sehingga prosesnya dilakukan di bawah kolong rumah secara bergantian.

6) Kondisi Perumahan Dan Pemukiman Penduduk

Kondisi rumah penduduk pada umumnya adalah bangunan rumah bawah dan rumah atas (panggung) yang tersusun rapi di kiri dan kanan jalan.Ukuran rumah ada yang besar dan ada yang kecil sehingga berbeda-beda bentuk rumahnya.

d) Sarana Perdagangan dan Jasa

Fasilitas perdagangan dan jasa sebagai sarana peningkatan kondisi ekonomi masyarakat. Di Desa Rappoa, memiliki berbagai jenis fasilitas perdagangan dan jasa yang untuk meningkatkan data beli dan taraf hidup masyarakat, dan demi menjaga kelangsungan hidup mereka. Sebagian masyarakat di Desa Rappoa ini membuka usaha dengan mempergunakan kios-kios untuk menjual kebutuhan sehari-hari. Selain itu, terdapat juga beberapa bengkel yang terletak di sepanjang jalan poros Bantaeng-Bulukumba. Di Desa

Rappoa juga terdapat sejumlah industri-industri kecil yang didirikan oleh masyarakat tersebut seperti pandai besi dan penjualan kayu. Untuk lebih jelasnya mengenai persebaran fasilitas perdagangan dan jasa dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Penyebaran Fasilitas Perdagangan dan Jasa di Desa Rappoa

No	Dusun	Warung	Kios	Bengkel	Toko
1	Boddong	1	5	1	1
2	Rappoa	1	11	1	2
3	Sapa-sapa	-	4	2	1
4	Tonro Kassi	1	2	-	-
5	Kampong Toa	-	2	-	-
Jumlah		3	24	4	4

Sumber: Profil Desa Rappoa (2025)

e) Sarana Peribadatan

Dengan latar belakang penduduk di Desa Rappoa yang beragama Islam, sehingga di wilayah tersebut tidak terdapat fasilitas peribadatan selain mesjid. Untuk lebih jelasnya dapat diliat pada tabel berikut;

Tabel 4. 2 Fasilitas Peribadatan di Desa Rappoa

No	Dusun	Masjid	Musholla	Gereja	Kuil	Total
1	Boddong	-	1	-	-	1
2	Rappoa	1	-	-	-	1
3	Kampong Toa	-	-	-	-	1
4	Sapa-sapa	-	-	-	-	-
5	Tonro Kassi	1	-	-	-	1
Jumlah		2	1	-	-	4

Sumber: Profil Desa Rappoa (2025)

f) Sarana Olahraga

Untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat, pemerintah Desa Rappoa telah menyediakan beberapa fasilitas olahraga. Untuk lebih jelasnya dapat diliat pada tabel dibawah ini;

Tabel 4. 3 Persebaran Falisiltas Olahraga di Desa Rappoa

No	Dusun	Lapangan Bulu Tangkis	Lapangan Futsal	Lapangan Takrow	Jumlah
1	Boddong	-	-	-	-
2	Rappoa	1	1	1	3
3	Sapa-sapa	-	-	1	1
4	Tonro Kassi	-	-	1	1
5	Kampong Toa	-	-	1	1
Jumlah		1	2	4	6

Sumber: Profil Desa Rappoa (2025)

g) Sarana Pemakaman

Dalam satu wilayah perlu diterapkan lokasi untuk pemakaman umum agar warga di wilayah tersebut tidak sembarangan menetapkan makam untuk keluarganya. Hal seperti ini sangat megganggu sangat mengganggu dalam penataan ruang suatu wilayah. Untuk di Desa Rappoa terdapat 3 Unit pemakaman umum. Lokasi pemakaman dalam satu lingkungan yaitu di Dusun Boddong, Kampong Toa, dan Sapa-sapa

2. Prasarana

a) Prasarana Jalan

Kondisi jaringan jalan di Desa Rappoa. untuk lebih jelasnya mengenai prasarana jalan lihat tabel di bawah ini;

Tabel 4. 4 Klasifikasi Jaringan Jalan di Desa Rappoa

No.	Nama Jalan	Lebar (M)	Fungsi	Jenis	Kondisi
1	Jl. Pinang Raya 1, Dusun Bodong	4 M	Lingkungan	Aspal	Baik
2	Jl. Pinang Raya 2, Dusun Rappoa	4 M	Lingkungan	Beton	Baik
3	Jl. Pinang Raya 3, Dusun Kampong Toa	4 M	Arteri	Aspal	Baik
4	Jl. Pinang Raya 4, Dusun Sapa-sapa	2 M	Lingkungan	Beton	Baik
5	Jl. Pinang Raya 5, Dusun Tonro Kassi	4 M	Lokal	Aspal	Baik

Sumber: RPJMDes Desa Rappoa 2022-2028

b) Prasarana Listrik

Jaringan listrik merupakan prasarana yang dibutuhkan masyarakat dalam skala besar, sehingga pengadaan jaringan listrik di daerah sangat penting. Pasokan jaringan listrik yang ada di Desa Rappoa semuanya bersumber dari pelayanan listrik PLN. Pelayanan listrik di Desa Rappoa sudah sangat baik, karena hampir semua rumah mendapatkan pasokan listrik. Sistem yang digunakan oleh PLN untuk menjangkau penduduk yang jauh dari ibukota kelurahan, dalam pendistribusinya menggunakan tiang-tiang listrik. Sehingga

kebutuhan akan listrik oleh masyarakat dapat terpenuhi dengan keseluruhan. Warga Desa Rappoa menggunakan listrik dengan tegangan rendah hingga sedang yaitu antara 450 hingga 200 megawatt. Berdasarkan survey yang kami lakukan tidak ditemukan penduduk yang menggunakan listrik non-PLN.

c) Prasarana Telekomunikasi Dan Jaringan

Jaringan telekomunikasi sangat penting sebagai alat yang digunakan masyarakat untuk berkomunikasi. Sebagian besar warga di Desa Rappoa sudah beralih menggunakan alat komunikasi berupa Telepon Genggam atau yang disebut dengan HP atau Hand Phone. Hal ini disebabkan penggunaan HP relative lebih murah dibanding menggunakan telepon rumah. Beralihnya masyarakat menggunakan HP karena penggunaan telepon rumah relative memerlukan biaya yang lebih. Oleh karena itu Pemerintah Desa Rappoa menyediakan fasilitas Ruang Public yang free wifi di setiap dusun.

d) Prasarana Air Bersih

Air merupakan kebutuhan primer manusia yang kedua setelah listrik, sehingga kebutuhan akan air bersih manusia sangat tidak terbatas berbanding terbalik dengan penyediaan air bersih yang semakin tidak layak konsumsi. Untuk memilih sumber air bersih penduduk tidak hanya memperhatikan dari segi kuantitas air saja akan tetapi sangat penting juga untuk memperhatikan kualitasnya. Jaringan air bersih yang ada di

Desa Rappoa adalah air bersih yang bersumber dari PDAM (PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM) (Perusahaan Daerah Air Minum).

e) Prasarana Drainase

Jaringan drainase merupakan pembuangan langsung dari alam dan juga limbah dari rumah-rumah penduduk.

Tabel 4. 5 Jaringan Drainase Di Desa Rappoa

NO	Klasifikasi	Lebar atas (cm)	Lebar bawah (cm)	Tinggi (cm)	Lebar bahu (cm)
1	Sekunder	25	20	50	30

Sumber: RPJMDes Desa Rappoa 2022-2028

f) Prasarana Persampahan

Begitu pentingnya keberadaan jaringan dan sistem persampaan demi terciptanya keindahan dan kebersihan wilayah. Berdasarkan pengamatan kami, Sistem persampaan yang ada di Desa Rappoa sudah sangat memadai, dimana didepan rumah masing-masing warga terdapat bak sampah, sehingga warga tidak lagi kesulitan untuk membuang sampah sampah mereka. Bak sampah tersebut dibuat oleh pihak pemerintah Desa setempat kemudian di letakan di depan rumah warga untuk langsung digunakan. Apresiasi yang sangat tinggi diberikan oleh warga adalah dengan cara menanamkan kesadaran diri untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat demi terciptanya Desa Rappoa yang indah dan bersih. Keberadaan bak-bak sampah seperti ini berperan

penting dalam menciptakan kebersihan wilayah. Sampah-sampah yang ada di bak tersebut kemudian di angkut oleh kontainer di angkut ke tempat pembuangan akhir (TPA) yang terletak di sepanjang jalan poros Desa dan Dusun – Dusun di Desa Rappoa.



Gambar 4. 2 Sketsa Pengangkutan Jaringan Persampahan di Desa Rappoa

6. Keadaan Sosial

Desa Rappoa memiliki struktur pemerintahan yang lengkap, terdiri atas 5 dusun, 7 RK (Rukun Keluarga), dan 11 RT(Rukun Tetangga) yang dipimpin oleh kepala dusun serta ketua RT (Rukun Tetangga) dan RK (Rukun Keluarga). Jumlah penduduknya sekitar 1.617 jiwa, dengan distribusi hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan. Mayoritas warga beragama Islam dan aktif beribadah di mesjid-mesjid yang tersebar di dusun Boddong, Rappoa, Kampong Toa, dan Tonro Kassi. Masyarakatnya hidup harmonis dan aktif dalam kegiatan belajar, termasuk 10 kelompok Keaksaraan Fungsional yang dilaksanakan secara bergantian di bawah kolong rumah karena keterbatasan fasilitas. Pelayanan kesehatan cukup memadai dengan adanya puskesdes, posyandu, tenaga medis, dan kader kesehatan yang rutin melayani warga. Penduduk umumnya bermukim di rumah baja dan rumah

panggung yang tersusun rapi di sepanjang jalan desa, menciptakan lingkungan yang tertib.

7. Keadaan Ekonomi

Sebagian besar penduduk Desa Rappoa bermata pencaharian sebagai petani dengan komoditas utama seperti padi, jagung, kedelai, dan kacang, serta bekerja sebagai nelayan dan peternak sapi maupun kambing. Potensi utama ekonomi desa ini terletak pada sektor pengembangan rumput laut, pertanian, perikanan, dan pariwisata. Selain itu, sumber penghasilan masyarakat juga berasal dari perdagangan hasil tani, jasa pemerintahan, serta pekerjaan lain seperti pegawai negeri sipil (PNS) dan pengusaha. Kondisi perekonomian desa tergolong stabil dan terus berkembang, didukung oleh akses pasar di sekitar wilayah dan hasil komoditas yang telah dipasarkan baik di dalam negeri maupun dieksport ke luar negeri.

Tabel 4. 6 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Rappoa

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Satuan
1	Petani	12	Jiwa
2	Wiraswasta	71	Jiwa
3	Karyawan	5	Jiwa
4	Pegawai Negeri Sipil / ASN	17	Jiwa
5	Pensiunan	2	Jiwa
6	Guru/ Guru Honorer	1	Jiwa
7	Nelayan	60	Jiwa
8	Mengurus Rumah Tangga	27	Jiwa
9	Petani	97	Jiwa
10	Buruh	9	Jiwa
11	Lainnya	77	Jiwa
Jumlah		378	Jiwa

Sumber: Profil Desa Rappoa (2025)

8. Masalah dan Potensi

Desa Rappoa memiliki berbagai potensi yang mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu unggulan desa ini adalah budidaya rumput laut yang telah dieksport ke pasar internasional. Di sektor pertanian, lahan yang subur memungkinkan petani untuk melakukan panen hingga tiga kali dalam setahun, sehingga meningkatkan hasil produksi. Selain itu, desa ini juga memiliki potensi wisata berbasis alam dan budaya, seperti Sumur Tua di Kampong Toa yang menyimpan nilai sejarah dan dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata. Potensi lain yang cukup besar terdapat pada sektor peternakan

dan perikanan, didukung oleh letak geografis desa yang berada di wilayah pesisir serta adanya program seminasi unggul untuk meningkatkan hasil ternak.

Namun, Desa Rappoa juga masih menghadapi beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian. Salah satunya adalah masih adanya pasangan usia subur yang belum mengikuti program Keluarga Berencana (KB), sehingga pengelolaan keluarga dan kependudukan perlu terus ditingkatkan. Selain itu, ketersediaan fasilitas peribadatan dan fasilitas olahraga masih terbatas di beberapa dusun, sehingga belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, sistem pendataan dan informasi desa masih perlu diperbaiki agar lebih lengkap dan akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan yang lebih baik.

9. Kebijakan Pengelolaan Dana Desa

Desa Rappoa terus berkomitmen untuk meningkatkan fasilitas pemerintahan dan layanan publik sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Pengembangan sarana kesehatan, seperti poskesdes dan posyandu, menjadi salah satu prioritas utama agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan lebih baik. Dalam bidang ekonomi, desa ini mendorong pengembangan kegiatan pertanian, perikanan, dan pariwisata yang menjadi potensi unggulan, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, pembangunan infrastruktur desa terus diupayakan, termasuk penyediaan sarana olahraga dan fasilitas ibadah yang lebih memadai di setiap dusun,

guna menunjang kehidupan sosial dan keagamaan warga. Sebagai bentuk keseriusan dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa juga berkomitmen mengelola dana desa secara transparan dan efektif, serta menyusun program-program pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat dan potensi yang dimiliki desa, agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh seluruh warga.

a. Tujuan Pengelolaan Dana Desa

Tujuan kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Rappoa

Kabupaten Bantaeng

1. Meningkatkan pelayanan publik memastikan tersedianya fasilitas pemerintahan, kesehatan, dan sosial yang memadai agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara adil dan merata
2. Pengembangan potensi desa mendukung pengembangan potensi ekonomi desa seperti peternakan, pertanian, perikanan, dan pariwisata sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat kemandirian desa)
3. Penyediaan infrastruktur dan fasilitas umum meningkatkan dan memperluas infrastruktur desa agar mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, termasuk fasilitas ibadah dan olahraga.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan penggunaan dana desa untuk memastikan lebih transparan dan akuntabel.

5. Memperkuat kelembagaan desa agar mampu merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara optimal.

b. Proses Penyusunan Kebijakan

Kebijakan ini disusun melalui:

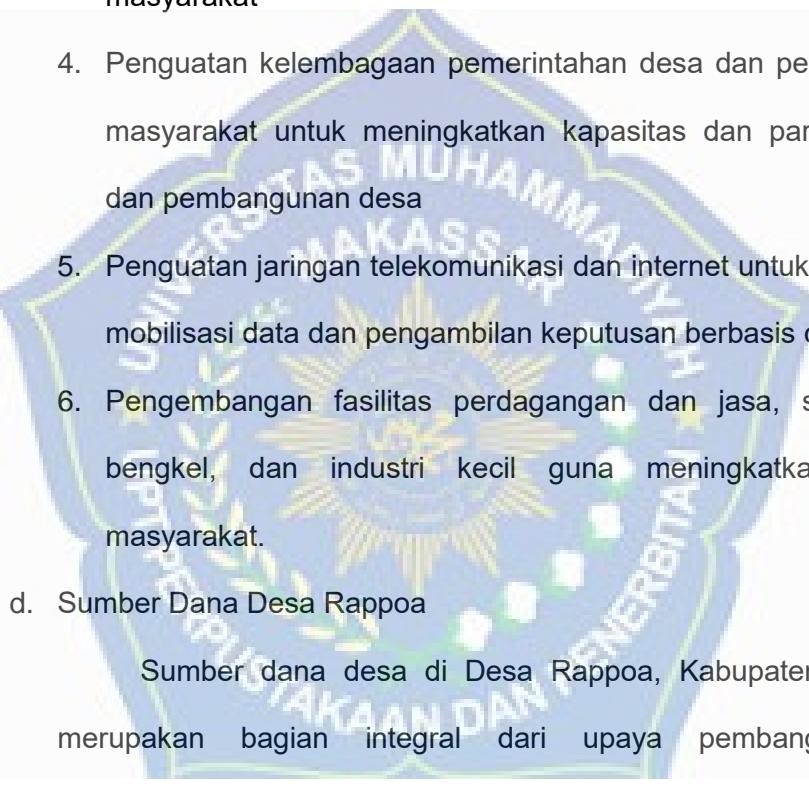
1. Pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dengan Sk (Surat Keputusan) Kepala Desa.
2. Pelatihan tim agar mampu menyusun dokumen sesuai UU No. 6 Tahun 2014 dan permendagri No. 114 Tahun 2014
3. Penyusunan rancangan RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) berdasarkan data SID (Sistem Informasi Desa), hasil musyawarah, dan peta jalan SDGs (Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)
4. Musrembang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Desa untuk membahas dan menyetujui rancangan kebijakan.
5. Musyawarah desa untuk menetapkan kebijakan menjadi peraturan desa yang sah.

c. Prioritas Penggunaan Dana

Dana Desa di Desa Rappoa difokuskan pada:

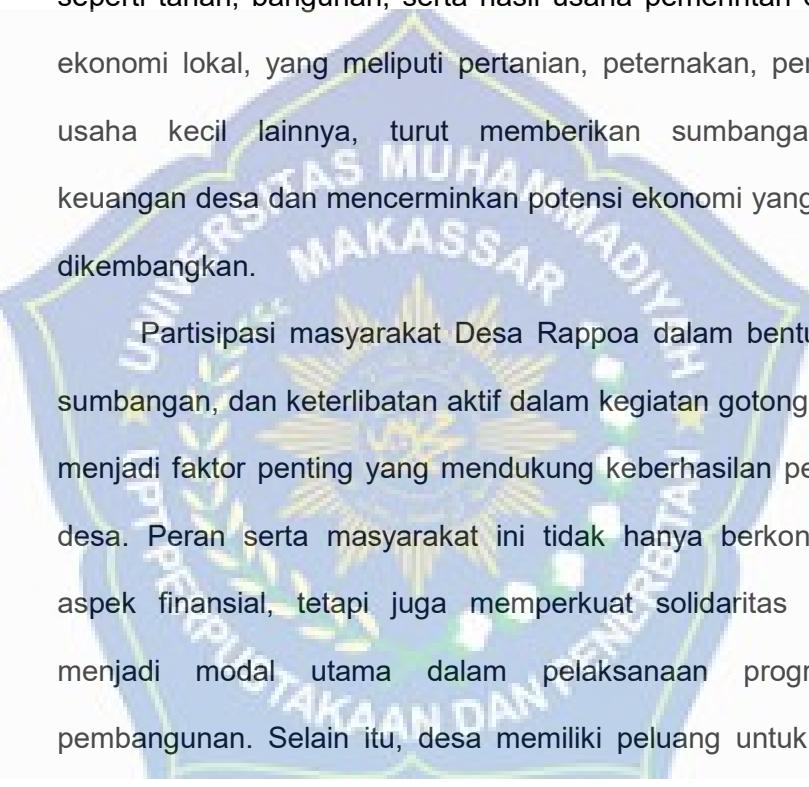
1. Pengembangan sektor ekonomi desa seperti pertanian (termasuk hasil panen berkualitas dan tanaman organik), peternakan (sapi,kambing, dan usaha pembibitan), perikanan (nelayan pesisir), dan pariwisata berbasis alam dan budaya.

2. Peningkatan akses dan fasilitas layanan dasar seperti air bersih berasal dari PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) dan sumur tua (bungun Rappoa), serta listrik dengan tegangan rendah hingga sedang.
 3. Pengembangan infrastruktur desa, termasuk jalan dan jaringan telekomunikasi yang mendukung mobilitas dan komunikasi masyarakat
 4. Penguatan kelembagaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi aktif dan pembangunan desa
 5. Penguatan jaringan telekomunikasi dan internet untuk mendukung mobilisasi data dan pengambilan keputusan berbasis data
 6. Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa, seperti kios, bengkel, dan industri kecil guna meningkatkan ekonomi masyarakat.
- d. Sumber Dana Desa Rappoa



Sumber dana desa di Desa Rappoa, Kabupaten Bantaeng, merupakan bagian integral dari upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang diarahkan oleh kebijakan nasional melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana tersebut bersumber dari kombinasi berbagai pihak, yakni alokasi dari pemerintah pusat, pendapatan asli desa, partisipasi masyarakat, serta bantuan dari pihak lain yang sah. Dana Desa yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi sumber utama yang memberikan kontribusi signifikan

dalam pelaksanaan program pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat. Penyaluran dana ini dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur desa, mendukung pengembangan potensi lokal, serta meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat. Selain itu, Desa Rappoa juga mengandalkan pendapatan asli desa yang diperoleh dari pengelolaan aset desa, seperti tanah, bangunan, serta hasil usaha pemerintah desa. Sektor ekonomi lokal, yang meliputi pertanian, peternakan, perikanan, dan usaha kecil lainnya, turut memberikan sumbangan terhadap keuangan desa dan mencerminkan potensi ekonomi yang dapat terus dikembangkan.



Partisipasi masyarakat Desa Rappoa dalam bentuk swadaya, sumbangan, dan keterlibatan aktif dalam kegiatan gotong royong juga menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan pembangunan desa. Peran serta masyarakat ini tidak hanya berkontribusi pada aspek finansial, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial yang menjadi modal utama dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Selain itu, desa memiliki peluang untuk mengakses bantuan dan hibah dari pemerintah daerah, lembaga swasta, maupun organisasi masyarakat yang mendukung penguatan kapasitas desa. Kombinasi dari berbagai sumber dana ini, apabila dikelola secara transparan dan akuntabel, dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam konteks Desa Rappoa, optimalisasi pengelolaan dana dari berbagai sumber ini menjadi kunci dalam mengatasi tantangan

pembangunan, memberdayakan potensi lokal, serta menciptakan kemandirian desa yang berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan dana desa di Rappoa tidak hanya bergantung pada besar kecilnya dana yang diterima, tetapi juga pada sejauh mana desa mampu mengelola, memanfaatkan, dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.

B. Hasil Penelitian

1. Kebijakan Penggunaan Dana Desa

Kebijakan penggunaan dana desa yang diterapkan di Desa Rappoa sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang diatur dalam regulasi nasional, terutama berdasarkan undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Kebijakan ini menekankan transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Hasil wawancara dengan kepala Desa Rappoa Irwan Darfin mengungkapkan bahwa dana desa digunakan secara transparan dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaannya. Dalam beberapa tahun terakhir dana desa di prioritaskan untuk:

a. Pembangunan Infrastruktur

- 1) Pembangunan dan perbaikan jalan desa serta drainase, dan fasilitas umum lainnya, termasuk fasilitas olahraga dan ibadah.
- 2) Penyediaan akses air bersih yang berasal dari sumber seperti PDAM (Perusahaan daerah Air Minum).
- 3) Penyediaan prasarana listrik yang bekerjasama dengan PLN (Pembangkit Listrik Negara)

4) Penyediaan fasilitas wifi gratis

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa terus berupaya mengelola dana desa secara transparan dan tepat sasaran. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala desa mengatakan bahwa:

“kami memastikan dana desa digunakan sesuai dengan rencana pembangunan agar manfaatnya tepat sasaran” ungkap Irwan Darfin, Kepala Desa (25, Maret 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga, efektifitas program menunjukkan variasi, sebagian warga merasakan manfaatnya secara langsung, khusunya pada pembangunan jalan dan posyandu, sedangkan sebagian lainnya menyatakan bahwa program belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat lokal Desa Rappoa mengatakan bahwa:

“Jalan setapak sangat membantu terutama untuk akses ke laut dan ke sawah. Dulu jalannya masih tanah dan masih licin kalau hujan, sekarang sudah lebih bagus dilewati.” Ungkap Nur Ati, Tukang Jahit (25, Maret 2025)

b. Program Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat

- 1) Bantuan sosial bagi warga kurang mampu
- 2) Kelompok belajar pelatihan keterampilan
- 3) Pembangunan posyandu dan poskesdes
- 4) Program bantuan siswa anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Seiring dengan perkembangan sektor sosial dan kesehatan, masyarakat kini merasakan perubahan signifikan dalam akses terhadap bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan pelayanan

kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala seksi kesejahteraan mengatakan bahwa:

“Dengan adanya bantuan sosial, pelatihan keterampilan, serta layanan kesehatan, masyarakat desa kini lebih mudah mengakses berbagai layanan.” Ungkap Irwan Marzuki, Kepala Seksi Kesejahteraan (25, Maret 2025)

Beberapa warga mengungkapkan bahwa meskipun program sosial telah dilaksanakan, mereka merasa bahwa distribusinya belum sepenuhnya merata diseluruh lapisan masyarakat. Mereka mencatat adanya ketimpangan dalam penyebaran bantuan, dimana beberapa daerah atau kelompok tertentu merasa lebih di untungkan, sementara yang lainnya merasa terabaikan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat lokal Desa Rappoa mengatakan bahwa:

“Saya yang sebelumnya mendapatkan BLT dan sembako sekarang tidak menerima lagi, pencabutan ini sangat membebani saya, karena bantuan tersebut sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari” Ungkap Marwah, wiraswasta (25, Maret 2025)

- c. Pemberdayaan Ekonomi
 - 1) Pelatihan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan sumber penghasilan.
 - 2) Pengembangan potensi desa seperti pertanian, perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan pendapatan warga.

Program pemerintah yang fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat telah memberikan dampak positif bagi banyak keluarga. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala seksi kesejahteraan mengatakan bahwa:

“Kami adakan pelatihan keterampilan seperti menjahit dan mengolah hasil tani, lalu kami juga kembangkan potensi desa di bidang pertanian, budidaya rumput laut, nelayan tangkap, pertukangan dan perbengkelan.” Ungkap Irwan Marzuki Kepala Seksi Kesejahteraan (25, Maret 2025)

Beberapa warga menilai bahwa program ini belum sepenuhnya menjangkau seluruh kelompok masyarakat, sehingga masih ada kalangan yang belum merasakan manfaatnya secara langsung. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat lokal Desa Rappoa mengatakan bahwa:

“saya belum merasakan manfaat dari program dana desa, mungkin programnya ada, tapi belum sampai kesemua warga.” Ungkap Badariah, Ibu Rumah Tangga (27, Maret 2025)

2. Dampak Pengelolaan Dana Desa

a. Dampak terhadap Infrastruktur

Pembangunan jalan tani dan irigasi telah memberikan dampak yang besar bagi para petani. Infrastruktur jalan yang lebih baik mempermudah mobilitas masyarakat dan mempercepat pengiriman hasil pertanian ke pasar. Meski demikian, masih terdapat beberapa bagian jalan utama yang perlu diperbaiki. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat lokal Desa Rappoa mengatakan bahwa:

“Salah satu dampak yang dirasakan adalah pembangunan jalan setapak yang sangat mempermudah pergerakan warga khususnya petani dan nelayan” Ungkap Muhamajir, Wiraswasta (29, Maret 2025)

b. Dampak terhadap Kesejahteraan Sosial

Program sosial seperti pembangunan posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) dan penyediaan air bersih telah meningkatkan layanan kesehatan masyarakat. Namun, masih ada masyarakat yang

mengeluhkan keterbatasan fasilitas di beberapa area desa. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala seksi Kesejahteraan mengatakan bahwa:

“Sekarang layanan kesehatan lebih mudah dijangkau, terutama dengan adanya posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) yang lebih baik dan disediakan obat-obat pemeriksaan gratis” Ungkap Irwan Marzuki, Kepala Seksi Kesejahteraan (25, Maret 2025)

c. Dampak terhadap Ekonomi Masyarakat

Program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha telah membantu beberapa warga meningkatkan pendapatan. Namun, belum semua warga merasakan manfaat program ini secara langsung. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala desa mengatakan bahwa:

“pelatihan keterampilan telah meningkatkan pendapatan banyak keluarga.” Ungkap Irwan Marzuki, Kepala Seksi Kesejahteraan (25, Maret 2025)

Beberapa kendala masih ditemukan dalam distribusi manfaat program ini. Sejumlah warga menyampaikan bahwa program usaha kecil dan bantuan modal belum sepenuhnya merata, sehingga tidak semua pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk merasakan dampaknya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat lokal Desa Rappoa mengatakan bahwa:

“Program pemberdayaan ekonomi memang telah berjalan. Namun, masih membutuhkan dukungan lebih, agar dampaknya dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat” Ungkap Dian Hardianti, Ibu Rumah Tangga (27, Maret 2025)

3. Kendala Dalam Implementasi Dana Desa

Meskipun dana desa, memberikan manfaat, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasinya:

a. Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan

Kelembagaan Desa Sertas unsur masyarakat Desa diikutsertakan dalam penyelenggaraan pemerintah Desa. Beberapa warga merasa kurang dilibatkan dalam musyawarah desa terkait dana desa. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan ditingkat desa masih perlu mendapat perhatian, khususnya dalam hal keterlibatan warga secara aktif. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat lokal Desa Rappoa mengatakan bahwa:

“Saya belum pernah dilibatkan dalam musyawarah desa ataupun pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa” Ungkap Marwah, Wiraswasta (25, Maret 2025)

b. Sistem Peraturan yang Bersifat Dinamis (tidak tetap)

Perubahan peraturan yang tiba-tiba dari pemerintah pusat menghambat pelaksanaan program yang sudah direncanakan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala desa mengatakan bahwa:

“sebelum adanya anggaran desa yang turun ke desa kami, semua aparat desa sudah menyusun program yang akan direalisasikan, tapi terkadang untuk penyaluran dana desa mengalami kendala atau lambat kami realisasikan, dengan faktor adanya perturuan pemerintah pusat yang berubah, baik itu dari sisi anggaran ataupun penyalurannya, sehingga kami apparat desa Menyusun ulang program-program yang direncanakan dan menyesuaikan anggaran desa yang turun ke desa kami” Ungkap Irwan Darfin, kepala desa (25, Maret 2025)

4. Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa

Dana desa diketahui oleh masyarakat serta keluar masuknya dana transparan dijabarkan oleh perangkat desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur,

serta adil mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan Untuk menjaga transparansi, pemerintah desa melakukan langkah-langkah seperti:

- a. Memasang informasi penggunaan dana di papan informasi
- b. Audit keuangan oleh instansi terkait
- c. Mengadakan rapat terbuka dengan warga

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala desa mengatakan bahwa:

“kami rutin menyelenggarakan pertemuan terbuka bersama masyarakat dan menyebarkan informasi terkait penggunaan dana melalui papan Informasi” Ungkap Irwan Darfin, Kepala Desa Rappoa (25, Maret 2025)

Sebagian besar masyarakat memiliki pandangan yang sejalan, yakni merasa bahwa informasi terkait dengan dana desa sudah disampaikan secara terbuka dan menyeluruh. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat lokal Desa Rappoa mengatakan bahwa:

“menurut saya, pengelolaan dana desa selama ini sudah cukup baik dan transparan. Bahkan informasinya pernah diumumkan secara langsung di mesjid agar semua warga bisa tahu” Ungkap Mantasiah, Guru (29, Maret 2025)

Kewajiban untuk pertanggungjawabkan pengelolaan serta pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, asas akuntabel yang telah menentukan aktivitas serta hasil akhir penyelenggaraan pemerintahan desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Untuk memahami lebih jelas bagaimana kebijakan pengelolaan dana desa dijalankan di Desa Rappoa, peneliti melakukan wawancara

langsung dengan beberapa orang, seperti perangkat desa, anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan Perwakilan warga. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui seberapa baik kebijakan tersebut sudah dijalankan dan bagaimana pengaruhnya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, wawancara juga digunakan untuk mengetahui apa saja kendala atau hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan dana desa. Hasil dari wawancara ini kemudian dirangkum dalam bentuk tabel yang membagi informasi ke dalam tiga bagian utama, yaitu penggunaan dana desa, dampak bagi masyarakat, dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

5. Partisipatif

Partisipatif dalam pengelolaan dana desa di Desa Rappoa telah diterapkan secara nyata melalui berbagai mekanisme dan kegiatan yang melibatkan masyarakat secara aktif. Hal ini tercermin dari perlaksanaan Musyawarah Desa (MusDes) yang dilakukan secara rutin sebagai wadah warga menyampaikan aspirasi dan menetapkan skala prioritas pembangunan. Selain itu, peran lembaga desa seperti BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) juga sangat terlihat dalam proses perencanaan hingga pengawasan penggunaan dana desa. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan sekertaris desa mengatakan bahwa:

“Dalam setiap tahap perencanaan, kami mulai dengan MusDus (Musyawarah Dusun) agar aspirasi dari tiap dusun bisa tertampung. Masyarakat juga kami libatkan secara langsung, karena kami ingin kegiatan yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka” Ungkap Husni Mubarak, Sekertaris Desa (25, Maret 2025)

Selain itu, masyarakat juga menyampaikan bahwa mereka tidak hanya hadir dalam rapat, tetapi juga ikut dilibatkan dalam pelaksanaan program di desa. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

“kami dilibatkan bukan Cuma untuk hadir di rapat, tapi juga saat kegiatan berjalan seperti pembangunan jalan atau pelatihan. Jadi kami merasa punya tanggung jawab bersama” Ungkap Syamsuddin T, Kepala Dusun Rappoa (26, Maret 2025).

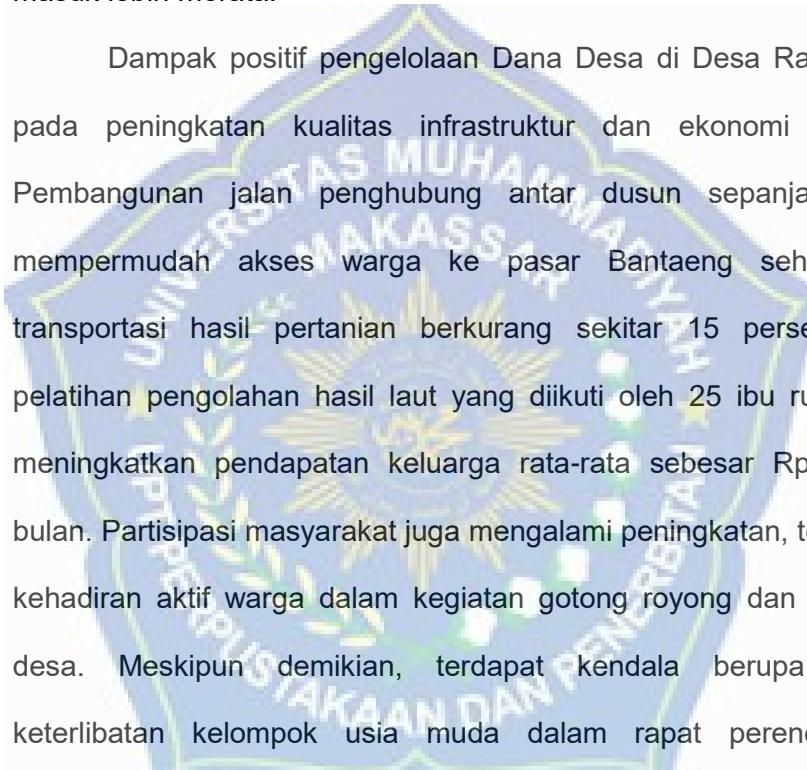
6. Tertib Serta Disiplin Anggaran

Tertib serta disiplin anggaran yakni landasan ataupun pedoman dalam mengelola keuangan desa harus dilaksanakan. Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa yakni:

- a. Rencana pendapatan ialah gambaran yang ternilai secara logis yang bisa didapat untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan anggaran belanja ialah batas maksimal pengeluaran belanja.
- b. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup serta tidak dibenarkan melaksanakan aktivitas yang belum tersedia maupun tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa/perubahan APB Desa
- c. Semua penerimaan serta pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan APB Desa serta dilakukan memalui Rekening Kas Desa.(Ezquerro et al., 2024)

BerdasRappoa telah dilaksanakan sesuai ketentuan Permendagri No. 113 Tahun 2014, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertangguarkan hasil penelitian, tahapan pengelolaan Dana Desa di Desa njawaban. Namun, jika

dibandingkan dengan prinsip good governance, masih terdapat kelemahan pada aspek transparansi informasi kepada masyarakat. Papan informasi APBDes belum diperbarui secara berkala dan laporan realisasi kegiatan belum sepenuhnya dipublikasikan melalui media desa. Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan juga masih terbatas pada kelompok tertentu sehingga perlu diperluas agar aspirasi yang masuk lebih merata.



Dampak positif pengelolaan Dana Desa di Desa Rappoa terlihat pada peningkatan kualitas infrastruktur dan ekonomi masyarakat. Pembangunan jalan penghubung antar dusun sepanjang 1,2 km mempermudah akses warga ke pasar Bantaeng sehingga biaya transportasi hasil pertanian berkurang sekitar 15 persen. Program pelatihan pengolahan hasil laut yang diikuti oleh 25 ibu rumah tangga meningkatkan pendapatan keluarga rata-rata sebesar Rp500.000 per bulan. Partisipasi masyarakat juga mengalami peningkatan, tercemermin dari kehadiran aktif warga dalam kegiatan gotong royong dan musyawarah desa. Meskipun demikian, terdapat kendala berupa rendahnya keterlibatan kelompok usia muda dalam rapat perencanaan dan keterlambatan realisasi program akibat perubahan regulasi dari pemerintah pusat, yang berdampak pada mundurnya jadwal beberapa proyek infrastruktur.

C. Pembahasan

1. Kebijakan Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan Dana Desa di Desa Rappoa telah sejalan dengan prinsip-prinsip Good

Governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Transparansi tercermin melalui keterbukaan informasi penggunaan dana yang disampaikan kepada masyarakat, baik melalui musyawarah desa maupun media informasi resmi. Akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban yang lengkap serta audit keuangan secara berkala. Partisipasi terlihat dari keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kegiatan.

Prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten oleh aparatur desa, sehingga perencanaan dan pelaksanaan program dapat berjalan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Penelitian ini mendukung temuan Yulindawati (2024) yang menekankan pentingnya pelaksanaan kebijakan Dana Desa secara partisipatif untuk menghasilkan dampak positif terhadap pembangunan. Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan Potolau et al. (2024) yang menegaskan peran musyawarah desa dan pengawasan program sebagai faktor penting dalam efektivitas kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan Dana Desa di Desa Rappoa telah mengikuti ketentuan Permendagri No. 113 Tahun 2014, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Proses perencanaan dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat, sehingga usulan program dapat disesuaikan dengan prioritas pembangunan. Pada tahap pelaksanaan, program dikerjakan oleh tim pelaksana yang dibentuk oleh

pemerintah desa, dengan sumber daya yang berasal dari masyarakat setempat. Penatausahaan keuangan desa menggunakan sistem administrasi berbasis dokumen dan pencatatan sesuai format yang diatur oleh peraturan yang berlaku. Pelaporan dilakukan setiap akhir kegiatan dan disampaikan kepada pemerintah kabupaten, sedangkan pertanggungjawaban disampaikan kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa.

Jika dibandingkan dengan prinsip good governance, sebagian besar aspek akuntabilitas dan tertib anggaran telah terpenuhi, namun aspek transparansi dan partisipasi masyarakat masih perlu diperkuat. Informasi terkait APBDes dan realisasi kegiatan belum diperbarui secara berkala di papan informasi publik, dan keterlibatan masyarakat umum, terutama kelompok usia muda, dalam proses perencanaan masih rendah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Panirikan (2021) dan Yulindawati (2024) yang menunjukkan bahwa keterbatasan partisipasi masyarakat dan kurang optimalnya transparansi menjadi tantangan umum dalam pengelolaan Dana Desa.

2. Dampak Pengelolaan Dana Desa Terhadap Masyarakat

Pengelolaan Dana Desa di Desa Rappoa memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan warga. Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam kegiatan pembangunan menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap hasil yang dicapai. Selain itu, dana desa dikelola dengan tepat sasaran,

mengacu pada prioritas pembangunan yang telah disepakati bersama, sehingga manfaatnya dirasakan lebih merata oleh warga.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran kelembagaan desa di Rappoa memberikan kontribusi nyata dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan, berbeda dengan temuan AIDI (2020) yang mengungkap rendahnya fungsi pemerintahan desa akibat minimnya akses informasi dan partisipasi warga. Dengan konteks lokal yang kuat dan dukungan partisipasi masyarakat, kelembagaan desa di Rappoa berhasil menjadi penggerak dalam meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Desa. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan Dana Desa tidak hanya diukur dari hasil fisik, tetapi juga dari proses pengambilan keputusan yang inklusif, kapasitas aparatur, dan keterlibatan warga secara aktif.

Pengelolaan Dana Desa di Desa Rappoa memberikan dampak positif terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dari sisi infrastruktur, pembangunan jalan penghubung antar dusun sepanjang 1,2 km mempermudah mobilitas warga dalam mengakses pasar dan fasilitas umum, sehingga mengurangi biaya transportasi hasil pertanian. Pembangunan fasilitas publik seperti posyandu dan saluran drainase turut meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan kebersihan lingkungan. Dari sisi ekonomi, program pelatihan pengolahan hasil laut yang diikuti oleh 25 ibu rumah tangga mampu meningkatkan pendapatan keluarga rata-rata sebesar Rp500.000 per bulan. Tingkat partisipasi warga dalam kegiatan gotong royong dan musyawarah desa juga mengalami peningkatan setelah adanya program Dana Desa.

Namun, pelaksanaan program masih menghadapi kendala berupa keterlambatan realisasi akibat perubahan regulasi dari pemerintah pusat dan keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam manajemen keuangan berbasis digital. Kondisi ini sejalan dengan temuan Ridha Fahrul (2019) yang menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan Dana Desa tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan dana, tetapi juga oleh stabilitas regulasi dan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai dampak kebijakan pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat lokal di Desa Rappoa, Kabupaten Bantaeng, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kebijakan pengelolaan dana desa di desa Rappoa secara umum memberikan dampak positif terhadap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun begitu tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa masih rendah dan perlu ditingkatkan agar program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Dampak pengelolaan dana desa terhadap masyarakat di Desa Rappoa tergolong positif, terutama dalam peningkatan infrastruktur seperti jalan, air bersih, layanan pendidikan dan kesehatan, serta program pemberdayaan ekonomi. Pengelolaan dana desa telah mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi masyarakat, meskipun manfaatnya belum dirasakan merata diseluruh kalangan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, berikut adalah beberapa saran yang dapat dijadikan rekomendasi bagi pemerintah desa dan pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa:

1. Pemerintah desa perlu rutin mengadakan pelatihan agar aparatur lebih cakap dalam mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel.
2. Masyarakat perlu lebih dilibatkan dalam musyawarah dan pengawasan agar program pembangunan sesuai kebutuhan dan tepat sasaran.
3. Sistem pengawasan internal desa harus ditingkatkan guna mencegah penyimpangan dan memastikan efektivitas penggunaan dana desa.
4. Memberikan dukungan teknis dan sumber daya dari pemerintah daerah dan pusat agar pengelolaan dana desa berjalan lebih optimal.
5. Penelitian ini menyarankan agar ke depan dilakukan studi lanjutan yang lebih mendalam mengenai evaluasi kebijakan Dana Desa, tidak hanya dari sisi kuantitatif, tetapi juga dengan pendekatan kualitatif dan kontekstual. Hal ini penting untuk memahami dinamika sosial, budaya, serta karakteristik lokal masyarakat desa yang memengaruhi efektivitas kebijakan. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif tersebut, diharapkan Dana Desa dapat menjadi instrumen pembangunan yang benar-benar efektif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan."

DAFTAR PUSTAKA

- AIDI, M. S. (2020). Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *Skripsi*.
- Ananda Muhamad Tri Utama. (2022). *Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.* 9, 356–363.
- Bender, D. (2016). UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014. *ACM International Conference Proceeding Series*, 18-April-2(1), 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Christho, B. (2020). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Pa ' Tera Kecamatan Krayan Selatan.* 8(1), 137–150.
- Dana, P., & Dan, D. (2023). Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Indeks Desa Membangun Di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Manajemen Perpendaharaan*, 4(1), 51–71. <https://doi.org/10.33105/jmp.v4i1.486>
- Deviana, H. &. (2024). *Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa.*
- Ezquerro, L., Coimbra, R., Bauluz, B., Núñez-Lahuerta, C., Román-Berdiel, T., & Moreno-Azanza, M. (2024). Large dinosaur egg accumulations and their significance for understanding nesting behaviour. *Geoscience Frontiers*, 15(5). <https://doi.org/10.1016/j.gsf.2024.101872>
- Lase, K. (2021). *Strategi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di kantor desasihareo kecamatan somambawa kabupaten nias selatan.*
- Marcelleno, M., Mukaromah, S., Azzahra Maharani Safitri, N., & Imanuel, L. (2023). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan dan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 62–74. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.764>
- Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia. *Journal E-Gov Wiyata : Education and Goverment*, 1(1), 40–52. <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-govHalaman40>
- Panirikan, S. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Desa Raku Kecamatan Tabukan Utara. *Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (lain) Manado*, 1(1), 1–17.
- Panjaitan, P. D., & Damanik, H. (2023). Analisis Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Bah Damar Kecamatan Dolok Merawan. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(1), 60–70. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v5i1.566>
- Permatasari. (2021). *Dampak Sosial Dan Lingkungan Terhadap Masyarakat.*

- Potolau, M. J. N., Safriansyah, & Tamrin, S. H. (2024). Analisis Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Sorong. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 13–28. <https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/download/12638/pdf>
- Ridha Fahrul. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 253–276.
- Rika Widianita, D. (2023). Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Maiwa Kabupaten Enrekang Terhadap Keberadaan PT. Perkebunan Nusantara XIV Perspektif Ekonomi Islam. In *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam: Vol. VIII (Issue I)*.
- SILITONGA, M. G. (2024). *PENGARUH ALOKASI DANA DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS DESA SEI LAMA KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN ASAHAH) SKRIPSI OLEH: MILLENIO GUNAWAN SILITONGA PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITA*.
- Soekanto, S. (1986). *Teknik Analisis Data*.
- Ulul farihin, A. (2023). Meningkatkan Kesadaran Lingkungan melalui Edukasi dan Partisipasi Masyarakat. *MUJAHADA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(I), 21–32. <https://doi.org/10.54396/mjd.v1ii.967>
- Yuliawati, H. (2020). *Dampak pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat*.
- Yulindawati, Y. (2024). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dampaknya terhadap Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus di Desa Panton, Kecamatan Teunom, Aceh Jaya. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 107–123.

LAMPIRAN





LAMPIRAN DATA

Lampiran Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA APARATUR DESA

i. Jadwal Wawancara

1. Hari/Tanggal :
2. Waktu Mulai dan Selesai :

ii. Identitas Informan

Nama : Irwan Darfin
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Kepala Desa Rappoa

iii. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana kebijakan pengelolaan dana desa yang diterapkan di Desa Rappoa?
2. Apa saja prioritas penggunaan dana desa dalam beberapa tahun terakhir?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan dana desa?
4. Apa kendala utama dalam pengelolaan dana desa?
5. Bagaimana sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa?
6. Apa dampak paling nyata dari pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat?
7. Apa strategi yang akan diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dana desa ke depannya?

PEDOMAN WAWANCARA APARATUR DESA

i. Jadwal Wawancara

1. Hari/Tanggal :
2. Waktu Mulai dan Selesai :

ii. Identitas Informan

Nama : Hajrah
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Kepala Urusan Keuangan

iii. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan dana desa di Desa Rappoa?
2. Apa saja sumber pendapatan desa selain dana desa?
3. Bagaimana prosedur pencairan dan penggunaan dana desa?
4. Bagaimana sistem pencatatan dan pelaporan keuangan dana desa?
5. Apa tantangan terbesar dalam pengelolaan anggaran desa?
6. Bagaimana desa memastikan tidak terjadi penyalahgunaan dana desa?
7. Bagaimana evaluasi terhadap penggunaan dana desa setiap tahunnya?
8. Bagaimana Anda menjalankan proses penatausahaan keuangan desa, khususnya terkait pencatatan dan pelaporan dana?

PEDOMAN WAWANCARA APARATUR DESA

i. Jadwal Wawancara

1. Hari/Tanggal :
2. Waktu Mulai dan Selesai :

ii. Identitas Informan

Nama : Husni Mubarak
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Sekretaris Desa Rappoa

iii. Pertanyaan Penelitian

1. Apa peran dan tanggung jawab Sekretaris Desa dalam pengelolaan dana desa?
2. Bagaimana proses perencanaan anggaran dana desa dilakukan?
3. Apa saja dokumen administrasi yang harus disiapkan terkait pengelolaan dana desa?
4. Bagaimana koordinasi antara perangkat desa dalam penggunaan dana desa?
5. Apa tantangan terbesar dalam administrasi dana desa?
6. Bagaimana mekanisme pelaporan penggunaan dana desa ke instansi terkait?
7. Apakah ada kendala dalam hal regulasi atau aturan yang menghambat pengelolaan dana desa?

PEDOMAN WAWANCARA APARATUR DESA

i. Jadwal Wawancara

1. Hari/Tanggal :
2. Waktu Mulai dan Selesai :

ii. Identitas Informan

Nama : Irwan Marzuki
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan

iii. Pertanyaan Penelitian

1. Apa saja program kesejahteraan masyarakat yang didanai oleh dana desa?
2. Bagaimana dampak dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi?
3. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam program-program kesejahteraan?
4. Apa tantangan dalam menjalankan program kesejahteraan desa?
5. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui dana desa?
6. Apakah ada inovasi atau strategi khusus yang diterapkan dalam penggunaan dana desa untuk kesejahteraan?
7. Bagaimana hasil evaluasi program kesejahteraan yang telah dilaksanakan dengan dana desa?

PEDOMAN WAWANCARA TOKOH MASYARAKAT
(STUDI KASUS: DESA RAPPOA KABUPATEN BANTAENG)

i. Jadwal Wawancara

1. Hari/Tanggal :
2. Waktu Mulai dan Selesai :

ii. Identitas Informan

Nama : M. Nurdin D
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : ..
Pekerjaan : ..
Peran di Masyarakat : Kepala Dusun Boddong

iii. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pengelolaan dana desa di Desa Rappoa?
2. Apakah masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan pengawasan dana desa?
3. Apa dampak dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di desa?
4. Bagaimana pengaruh dana desa terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat?
5. Apakah program dana desa sudah merata dan tepat sasaran?
6. Apa tantangan utama dalam pengelolaan dana desa di desa ini?
7. Apakah ada kendala atau dugaan penyalahgunaan dana desa yang pernah terjadi?
8. Apa harapan dan saran Bapak/Ibu agar dana desa lebih bermanfaat bagi Masyarakat?

PEDOMAN WAWANCARA TOKOH MASYARAKAT
(STUDI KASUS: DESA RAPPOA KABUPATEN BANTAENG)

i. Jadwal Wawancara

1. Hari/Tanggal :
2. Waktu Mulai dan Selesai :

ii. Identitas Informan

Nama : Syamsuddin
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : ..
Pekerjaan : ..
Peran di Masyarakat : Kepala Dusun Rappoa

iii. Pertanyaan Penelitian

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang dana desa dan bagaimana penggunaannya di Desa Rappoa?
2. Apa manfaat yang Bapak/Ibu rasakan dari program-program yang dibiayai oleh dana desa?
3. Apakah pembangunan infrastruktur di desa, seperti jalan, fasilitas umum, atau layanan kesehatan, sudah mengalami peningkatan?
4. Bagaimana dampak dana desa terhadap mata pencaharian atau usaha masyarakat di desa ini?
5. Apakah Bapak/Ibu merasa dilibatkan dalam musyawarah atau pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa?
6. Menurut Bapak/Ibu, apakah dana desa sudah dikelola dengan baik dan transparan?
7. Apa kendala atau masalah yang masih dirasakan terkait penggunaan dana desa di desa ini?
8. Apa harapan dan saran Bapak/Ibu agar dana desa lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

PEDOMAN WAWANCARA MASYARAKAT
(STUDI KASUS: DESA RAPPOA KABUPATEN BANTAENG)

i. Jadwal Wawancara

3. Hari/Tanggal :
 4. Waktu Mulai dan Selesai :

ii. Identitas Informan

- Nama :
 Jenis Kelamin :
 Usia :
 Pekerjaan :
 Peran di Masyarakat :

iii. Pertanyaan Penelitian

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang dana desa dan bagaimana penggunaanya di Desa Rappoa?
2. Apa manfaat Bapak/Ibu rasakan dari program-program yang dibiayai oleh dana desa?
3. Apakah pembagunan infrastruktur di desa, seperti jalan, fasilitas umum, atau layan kesehatan, sudah mengalami peningkatan?
4. Bagaimana dampak dana desa terhadap mata pencaharian atau usaha masyarakat di desa ini?
5. Apakah Bapak/Ibu merasa dilibatkan dalam musyawarah atau pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa?
6. Menurut Bapak/Ibu, apakah dana desa sudah dikelola dengan baik dan transparan?
7. Apa kendala atau masalah yang masih dirasakan terkait penggunaan dana desa di desa ini?
8. Apa harapan dan saran Bapak/Ibu agar dana desa lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

Lampiran Coding Wawancara

WAWANCARA APARATUR DESA

I. Jadwal Wawancara

Hari/Tanggal :

Waktu Mulai dan Selesai :

II. Identitas Informan

Nama : Irwan Darfin

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Kepala Desa Rappoa

III. Pertanyaan:

1. Bagaimana kebijakan pengelolaan dana desa yang diterapkan di Desa Rappoa?

Jawaban: kami mengelola dana desa dengan transparan dan melibatkan masyarakat. Semua tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dilakukan bersama perangkat desa dan warga. Kami memastikan dana desa digunakan sesuai dengan rencana pembangunan agar manfaatnya tepat sasaran.

2. Apa saja prioritas penggunaan dana desa dalam beberapa tahun terakhir?

Jawaban: Dalam beberapa tahun terakhir, kami memprioritaskan dana desa untuk pembangunan jalan, saluran irigasi, dan penyediaan air bersih. Selain itu, kami juga mengalokasikan dana untuk mendukung usaha kecil, pelatihan keterampilan warga, dan peningkatan fasilitas kesehatan seperti posyandu dan poskesdes.

3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan dana desa?

Jawaban: Masyarakat sangat berperan dalam penggunaan dana desa. Mereka ikut serta dalam musyawarah desa untuk menentukan program prioritas. Selain itu, mereka juga libatkan dalam pembangunan melalui sistem pada karya, sehingga selain mendapat manfaat dari pembangunan, mereka juga mendapatkan tambahan penghasilan.

4. Apa kendala utama dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban: Beberapa kendala yang kami hadapi adalah kurangnya tenaga ahli dalam pengelolaan keuangan desa, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta keterlambatan pencairan dana dari pemerintah pusat karena undang-undang yang tiba-tiba berubah. Hal ini tentu bisa menghambat jalannya program yang sudah direncanakan.

5. Bagaimana sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa?

Jawaban: Untuk menjaga transparansi, kami selalu mengadakan rapat terbuka dengan warga dan memasang informasi penggunaan dana di papan Informasi penggunaan dana. Selain itu, dana desa diaudit oleh pihak terkait untuk memastikan penggunaannya sesuai aturan.

6. Apa dampak paling nyata dari pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat?

Jawaban: Dampak paling nyata dari dana desa adalah meningkatkannya akses warga ke jalan yang lebih baik, air bersih, layanan kesehatan dan pendidikan. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi juga sangat membantu meningkatkan pendapatan warga, terutama petani dan nelayan.

7. Apa strategi yang akan diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dana desa ke depannya?

Jawaban: Ke depannya, kami meningkatkan pelatihan bagi perangkat desa dalam mengelola keuangan dan perencanaan pembangunan. Selain itu, kami juga akan memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pengelolaan dana desa serta terus melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pembanguna agar manfaatnya lebih besar dan tepat sasaran.



WAWANCARA APARATUR DESA

I. Jadwal Wawancara

Hari/Tanggal :

Waktu Mulai dan Selesai :

II. Identitas Informan

Nama : Husni Mubarak

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Sekretaris Desa Rappoa

III. Pertanyaan:

1. Apa peran dan tanggung jawab Sekretaris Desa dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban: Peran sekdes dan tanggung jawab dalam hal pengelolaan dana desa sebenarnya pada dasarnya sangatlah banyak, tapi kalau kita mengacu pada aturan yang ada pada umumnya sebenarnya di desa sekdes adalah sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang mempunyai tugas diantaranya mengkoordinasi Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan penyusunan rancangan APBDes serta Rancangan Perubahan APBDes, rancangan perkades tentang Penjabaran APBDes hingga sampai laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban, ini sesuai dengan topuksi sekdes yang tertuang dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 tepatnya dalam pasal 5 dan tugas lainnya sekdes melakukan Verifikasi terhadap dokumen lainnya seperti DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), RAK (Rencana Kerja

Anggaran Desa) dan semua bukti penerimaan dan pengeluaran di APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

2. Bagaimana proses perencanaan anggaran dana desa dilakukan?

Jawaban: Proses perencanaan anggaran dana desa itu sebenarnya sudah ada juknis yang harus kita ikuti diantaranya melaksanakan Musdes (Musyawarah Desa) perencanaan yang dilaksanakan oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) difasilitasi pemdes (pemerintah desa) harus melalui Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan, Pembentukan Tim Penyusun RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) untuk menyusun Rancangan RKPDes dan setelah ada rancangan dilanjutkan dengan Musdes (Musyawarah Desa) pembahasan dan Musdes penetapan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dan setelah ada dokumen RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang telah disepakati maka dilanjutkan dengan Musdes (Musyawarah Desa) penyusunan Rancangan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dan setelah itu dilakukan Musdes (Musyawarah Desa) pembahasan tentang Rancangan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) tersebut dan setelah dilakukan pembahasan oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) maka dilanjutkan dengan Musdes (Musyawarah Desa) penetapan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), sebenarnya waktu/jadwal setiap tahapan itu sudah ada juknisnya.

3. Apa saja dokumen administrasi yang harus disiapkan terkait pengelolaan dana desa?

Jawaban: Dokumen admministrasi yang disiapkan secara umum yang memuat perencanaan diantaraya Dokumen RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), Dokumen RKPDes (Rencana

Kerja Pemerintah Desa) dan Dokumen APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

4. Bagaimana koordinasi antara perangkat desa dalam penggunaan dana desa?

Jawaban: mengenai Koordinasi diantara perangkat Desa memang harus dan wajib saling bekerja sama tanpa melupakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing

5. Apa tantangan terbesar dalam administrasi dana desa?

Jawaban: Sebenarnya mengenai tatangan dalam hal pengelolaan dana desa itu memang ada tapi tergantung kita sebagai perangkat desa bagaimana kita menyikapi tanggung jawab kita sebagai perangkat desa dalam hal

6. Bagaimana mekanisme pelaporan penggunaan dana desa ke instansi terkait?

Jawaban: Mengenai mekanisme pelaporan penggunaan dana itu sudah ada alurnya yang telah ditentukan sesuai dengan prosedur dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan anggaran dan capaian atau output kepada Bupati di setiap tahap

7. Apakah ada kendala dalam hal regulasi atau aturan yang menghambat pengelolaan dana desa?

Jawaban: Dalam hal aturan atau regulasi yang menjadi penghambat pengelolaan dana desa sebenarnya tidak ada yang signifikan karena yang menjadi kendala sebenarnya hanya dari segi perencanaan kegiatan yang skala prioritas yang mengharuskan desa harus menyesuaikan atau melakukan sinkronisasi program kegiatan prioritas pemerintah pusat yang skala nasional.

WAWANCARA APARATUR DESA

I. Jadwal Wawancara

Hari/Tanggal : :

Waktu Mulai dan Selesai :

II. Identitas Informan

Nama : Irwan Marzuki

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan

III. Pertanyaan:

- 1. Apa saja program kesejahteraan masyarakat yang didanai oleh dana desa?**

Jawaban: Dana desa digunakan untuk berbagai program kesejahteraan, seperti bantuan sosial bagi warga kurang mampu, pembangunan posyandu dan poskesdes, penyediaan fasilitas air bersih, serta pelatihan keterampilan untuk meningkatkan ekonomi warga.

- 2. Bagaimana dampak dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi?**

Jawaban: dampaknya cukup besar, di bidang kesehatan, masyarakat kini lebih mudah mengakses layanan kesehatan dengan adanya posyandu dan poskesdes yang lebih baik dan disediakan obat-obatan pemeriksaan gratis. Di bidang pendidikan pemberian seragam sekolah untuk Paud/TK dan SD. Di bidang ekonomi pelatihan keterampilan, bantuan pompa pada petani, waring tali untuk rumput laut dan, jaring nelayan tangkap.

3. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam program-program kesejahteraan?

Jawaban: Masyarakat sangat aktif terlibat, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program. Kami selalu mengadakan musyawarah desa untuk mendengar masukan mereka. Selain itu, mereka juga turut serta dalam berbagai kegiatan, seperti pelatihan keterampilan dan program pada karya , yang memberikan manfaat ekonomi langsung. Gotong-royong saling bantu membantu misalnya menggerut irigasi budi daya rumput laut membuat jemuran rumput laut.

4. Apa tantangan dalam menjalankan program kesejahteraan desa?

Jawaban: tantangannya adalah cuaca misalnya budi daya rumput laut misalnya musim hujan telat produksi.

5. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui dana desa?

Jawaban: Kami terus berupaya mengoptimalkan penggunaan dana desa dengan fokus pada kebutuhan utama masyarakat. Support bantuan kegiatan desa di bidang pertanian solusi diberikan semua linik tanpa terkecuali tidak membeda-bedakan.

6. Apakah ada inovasi atau strategi khusus yang diterapkan dalam penggunaan dana desa untuk kesejahteraan?

Jawaban: salah satu bentuk inovasi yang diterapkan dalam penggunaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat yaitu di bidang pertanian berupa program pembagian pestisida untuk mencegah hama, dan program pupuk subsidi.

7. Bagaimana hasil evaluasi program kesejahteraan yang telah dilaksanakan dengan dana desa?

Jawaban: Secara umum, program-program kesejahteraan desa berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif. Seperti peningkatan ekonominya dari menengah kebawah menjadi menengah ke atas. Namun, ada beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan, seperti pemantauan jangka panjang terhadap para nelayan yang masih kurang dijangkau oleh bantuan dana desa. Kami terus melakukan evaluasi dan memperbaiki kekurangan agar kesejahteraan semakin efektif dan tepat sasaran.



WAWANCARA APARATUR DESA

I. Jadwal Wawancara

Hari/Tanggal :

Waktu Mulai dan Selesai :

II. Identitas Informan

Nama : Hajrah

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Kepala Urusan Keuangan

III. Pertanyaan:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan dana desa di Desa Rappoa?

Jawaban: pengelolaan keuangan dana desa dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dilakukan dengan melibatkan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Semua anggaran disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang ditetapkan setiap tahun.

2. Apa saja sumber pendapatan desa selain dana desa?

Jawaban: Selain dana desa dari pemerintah pusat, Desa Rappoa juga memperoleh pendapatan dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) kabupaten, Pendaapatan Asli Desa (PAD) seperti hasil usaha desa dan retribusi, serta bantuan keuangan dari pemerintah provinsi maupun hibah dari pihak lain.

3. Bagaimana prosedur pencairan dan penggunaan dana desa?

Jawaban: Dana desa dicairkan secara bertahap sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Setiap pencairan harus melalui proses administrasi, termasuk penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sebelumnya. Setelah dana cair, penggunaannya harus sesuai dengan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), serta diawasi oleh pihak terkait.

4. Bagaimana sistem pencatatan dan pelaporan keuangan dana desa?

Jawaban: Kami menggunakan sistem administrasi keuangan desa berbasis aplikasi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Setiap transaksi keuangan dicatat secara rinci, dan laporan keuangan dibuat secara berkala. Laporan ini kemudian diaudit oleh ispektorat Kabupaten dan disampaikan kepada masyarakat melalui musyawarah desa sebagai bentuk transparansi.

5. Apa tantangan terbesar dalam pengelolaan anggaran desa?

Jawaban: Dengan adanya sistem peraturan yang secara dinamis (tidak tetap) dari pemerintah pusat, yang menjadi kendala atau memperlambat akan realisasinya program-program yang sudah di rencanakan oleh para pihak aparat Desa. Dalam hal ini program-program yang sebelumnya sudah disusun oleh aparat Desa dapat berubah dan menyesuaikan kembali dengan dana Desa yang di salurkan. Meskipun dengan adanya kendala tersebut tidak menjadi suatu halangan untuk membuat Desa yang Asri dan Nyaman.

6. Bagaimana desa memastikan tidak terjadi penyalahgunaan dana desa?

Jawaban: Kami menerapkan sistem transparansi dengan menyampaikan laporan keuangan kepada asyarakat secara terbuka. Selain itu, ada pengawasan dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa), pendamping desa,

serta ispektorat Kabupaten. Setiap penggunaan dana juga harus memiliki bukti yang jelas agar tidak terjadi penyimpangan.

7. Bagaimana evaluasi terhadap penggunaan dana desa setiap tahunnya?

Jawaban: Evaluasi dilakukan setiap pencairan 4 bulan sekali melalui pelaporan pertanggungjawaban tahunan yang disusun oleh pemerintah desa dan dibahas dalam musyawarah desa. Hasil evaluasi ini digunakan untuk memperbaiki pengelolaan dana desa di tahun berikutnya, memastikan program yang kurang efektif tidak lagi dianggarkan, dan meningkatkan kualitas penggunaan anggaran.

8. Bagaimana Anda menjalankan proses penatausahaan keuangan desa, khususnya terkait pencatatan dan pelaporan dana?

Jawaban: Tahap penatausahaan yang dilakukan yaitu saya bertanggungjawab dalam pencatatan pendapatan dan dana yang dikeluarkan untuk pembangunan. jadi saya membuat laporan itu setiap bulan yang nantinya akan disampaikan dalam forum penyampaian LPJ atau laporan dan pertanggungjawaban

WAWANCARA TOKOH MASYARAKAT

I. Jadwal Wawancara

Hari/Tanggal :

Waktu Mulai dan Selesai :

II. Identitas Informan

Nama : Muh. Nurdin D

Jenis Kelamin : laki-laki

Usia : 50 tahun

Pekerjaan : Nelayan Rumput Laut

III. Pertanyaan:

- 1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pengelolaan dana desa di Desa Rappoa?**

Jawaban: Sampai saat ini, pengelolaan dana desa di Desa Rappoa sudah berjalan dengan baik. Program yang dirancang juga sudah dilaksanakan dan manfaatnya dirasakan oleh warga

- 2. Apakah masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan pengawasan dana desa?**

Jawaban: Iya, masyarakat tetap dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan melalui musyawarah desa (musdes). Dalam ini, setiap warga bisa menyampaikan usulan dan memberikan masukan terkait penggunaan dana desa

- 3. Apa dampak dana desa terhadap pembangunan infrastuktur di desa?**

Jawaban: Dampaknya cukup signifikan dan sesuai dengan perencanaan. Salah satu contohnya adalah pembangunan jalan setapak yang sangat membantu mobilitas warga terutama nelayan dan petani.

4. Bagaimana pengaruh dana desa terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat?

Jawaban: pengaruhnya cukup bagus. Karena membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah desa rutin memberikan bantuan yang sifatnya meningkatkan ekonomi warga seperti tali temali, pelampung untuk petani rumput laut. Untuk nelayan tangkap diberikan mesin dan jaring sedangkan untuk petani sawah diberikan bantuan pompa penyemprot hama, bantuan bibit, untuk pertukangan diberikan bantuan alat pertukangan, untuk tukang jahit diberikan bantuan mesin jahit, untuk tukang kayu diberikan alat.

5. Apakah program dana desa sudah merata dan tepat sasaran?

Jawaban: saya merasa program dana desa sudah tepat sasaran. Program yang dijalankan memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat yang nyata.

6. Apa tantangan utama dalam pengelolaan dana desa di desa ini?

Jawaban: Tantangan utama adalah adanya program dari pemerintah pusat yang kadang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Harus ada penyesuaian agar lebih bermanfaat bagi warga desa.

7. Apa kendala atau dugaan penyalahgunaan dana desa yang pernah terjadi?

Jawaban: Sejauh ini tidak ada kendala atau dugaan penyalahgunaan dana desa. Semua penggunaan dana desa diawasi dengan baik oleh pemerintah desa dan masyarakat.

8. Apa harapan dan saran Bapak/Ibu agar dana desa lebih bermanfaat bagi masyarakat?

Jawaban: Saya berharap pemerintah desa lebih semakin meningkatkan pelayanan dasar masyarakat dengan memprioritaskan program-program dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat dan, infrastuktur.



WAWANCARA TOKOH MASYARAKAT

IV. Jadwal Wawancara

Hari/Tanggal :

Waktu Mulai dan Selesai :

V. Identitas Informan

Nama : Syamsuddin T

Jenis Kelamin : laki-laki

Usia : 45 tahun

Pekerjaan : Tukang Kayu (Kepala Dusun)

VI. Pertanyaan:

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pengelolaan dana desa di Desa Rappoa?

Jawaban: Menurut saya, pengelolaan dana desa di Desa Rappoa sudah cukup baik, bantuan yang diberikan dari dana desa sudah tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal mendukung kegiatan sehari-hari dan pembangunan desa.

2. Apakah masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan pengawasan dana desa?

Jawaban: Iya dilibatkan,karena saya sebagai kepala dusun selalu diminta untuk memaksimalkan musdus (musyawarah dusun) terkait susulan penyusunan program yang di butuhkan masyarakat setiap tahunnya kegiatan ini biasanya dilakukan dirumah saya sebagai kepala dusun.

3. Apa dampak dana desa terhadap pembangunan infrastuktur di desa?

Jawaban: Dampak dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa sangat banyak karena program-program yang dilaksanakan desa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama kelompok-kelompok seperti disabilitas, kepala keluarga, lansia, dan prasejahtera.

4. Bagaimana pengaruh dana desa terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat?

Jawaban: sangat baik karena beberapa warga saya rutin mendapatkan bantuan untuk usahanya bantuan tali bentang, induk, pelampung, perahu, mesin, pompa hama.

5. Apakah program dana desa sudah merata dan tepat sasaran?

Jawaban: Cukup merata karena setiap tahun itu dilaksanakan program-program prioritas disetiap dusun yang ada di Desa Rappoa.

6. Apa tantangan utama dalam pengelolaan dana desa di desa ini?

Jawaban: Tantangan saya sebagai kepala dusun yaitu menghadirkan warga dalam proses Musdus (Musyawara Dusun) sebagai pengawas sesuai mutu dan volume harus sesuai

7. Apa kendala atau dugaan penyalahgunaan dana desa yang pernah terjadi?

Jawaban: Setau saya sebagai kepala dusun tidak ada karena selama 15 tahun saya mendampingi kepala desa tidak pernah ada satupun pelanggaran yang dilakukan pemerintah desa.

8. Apa harapan dan saran Bapak/Ibu agar dana desa lebih bermanfaat bagi masyarakat?

Jawaban: Harapan saya sebagai kepala dusun yaitu dana desa dari pusat ditambah, dan saran saya yaitu pemerintah desa mempertahankan prosedur penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa yang memegang prinsip good governance yang mengedepankan prinsip partisipatif, transparan dan akuntabel.

WAWANCARA MASYARAKAT LOKAL

I. Jadwal Wawancara

Hari/Tanggal :

Waktu Mulai dan Selesai :

II. Identitas Informan

Nama : Marwah

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 43 tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

III. Pertanyaan:

- 1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pengelolaan dana desa di Desa Rappoa?**

Jawaban: Saya tidak terlalu mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Rappoa karena kurangnya informasi yang sampai kepada masyarakat

- 2. Apakah masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan pengawasan dana desa?**

Jawaban: Saya pribadi belum pernah dilibatkan dalam musyawarah desa atau kegiatan perencanaan dana desa. Sejauh ini, keterlibatan masyarakat masih kurang.

- 3. Apa dampak dana desa terhadap pembangunan infrastuktur di desa?**

Jawaban: Saya merasa belum melihat pemerataan dalam pembangunan infrastruktur desa. Masih ada beberapa titik yang membutuhkan perbaikan jalan dan fasilitas lainnya.

4. Bagaimana pengaruh dana desa terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat?

Jawaban: Menurut saya, kesejahteraan masyarakat lokal lebih banyak bergantung pada usaha pribadi masing-masing, bukan dari program desa.

5. Apakah program dana desa sudah merata dan tepat sasaran?

Jawaban: saya rasa belum ada pemerataan yang jelas dalam penggunaan dana desa. Masih ada bagian masyarakat yang belum menerima manfaatnya secara langsung

6. Apa tantangan utama dalam pengelolaan dana desa di desa ini?

Jawaban: kurangnya transparansi dan keterlibatan masyarakat menjadi tantangan utama dalam pengelolaan dana desa

7. Apa kendala atau dugaan penyalahgunaan dana desa yang pernah terjadi?

Jawaban: setau saya, tidak pernah ada penyalahgunaan dana desa karena semua penggunaanya terpajang dipapan informasi, jadi kami sebagai warga bisa tau.

8. Apa harapan dan saran Bapak/Ibu agar dana desa lebih bermanfaat bagi masyarakat?

Jawaban: Harapan saya ke depan, pembagian bantuan seperti sembako bisa lebih merata, jangan sampai ada yang dilewatkan. Selain itu, pelayanan kesehatan juga sebaiknya lebih dimudahkan, supaya semua warga bisa mengaksesnya tanpa kesulitan.

WAWANCARA MASYARAKAT LOKAL

I. Jadwal Wawancara

Hari/Tanggal :

Waktu Mulai dan Selesai :

II. Identitas Informan

Nama : Badariah

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 50 tahun

Pekerjaan : IRT (ibu rumah tangga)

III. Pertanyaan:

- 1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang dana desa dan bagaimana penggunaannya di Desa Rappoa?**

Jawaban: Sejauh ini saya belum terlalu banyak mendapat penjelasan terkait pengelolaan dana desa, jadi saya tidak terlalu mengikuti perkembangannya.

- 2. Apa manfaat yang Bapak/Ibu rasakan dari program-program yang dibiayai oleh dana desa?**

Jawaban: Sampai sekarang, saya belum pernah merasakan langsung manfaat dari program-program dana desa. Mungkin karena tidak semua warga ikut terlibat atau dapat bantuan atau programnya belum sesuai dengan kebutuhan saya.

- 3. Apakah pembangunan infrastruktur di desa, seperti jalan, fasilitas umum, atau layanan kesehatan, sudah mengalami peningkatan?**

Jawaban: Kalau soal jalanan, sampai sekarang belum ada peningkatan atau perbaikan jadi masih rusak. Tapi kalau soal pelayanan kesehatan saya sudah mulai merasakan peningkatan, lebih mudah dan cepat dibanding dulu.

4. Bagaimana dampak dana desa terhadap mata pencaharian atau usaha masyarakat di desa ini?

Jawaban: setau saya pribadi, banyak petani belum menerima bantuan alat pertanian, kalau ada pun, berarti pembagiannya belum merata, jadi masih ada petani yang merasa tidak diperhatikan.

5. Apakah Bapak/ibu merasa dilibatkan dalam musyawarah atau pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa?

Jawaban: Saya belum dilibatkan langsung dalam musyawarah desa atau kegiatan yang berkaitan dengan dana desa. Jadi saya juga tidak terlalu paham tentang pengelolaannya.

6. Menurut Bapak/Ibu, apakah dana desa sudah dikelola dengan baik dan transparan?

Jawaban: Menurut saya pribadi sudah dikelola dengan baik dan transparansi karena selama ini informasi soal dana desa biasanya ditempel di papan informasi, jadi warga bisa lihat langsung apa saja kegiatan atau bantuan yang ada.

7. Apa kendala atau masalah yang masih dirasakan terkait penggunaan dana desa di desa ini

Jawaban: Kendala yang saya rasakan selama ini adalah pembagian bantuan yang belum merata. Ada warga yang sering dapat, tapi ada juga yang belum pernah dapat, padahal sama-sama membutuhkan.

- 8. Apa harapan dan saran Bapak/Ibu agar dana desa lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?**

Jawaban: Harapan dan saran saya ke depan, semoga pembagian bantuan dari dana desa bisa lebih merata, supaya semua warga yang membutuhkan bisa merasakannya tanpa ada yang tertinggal.



WAWANCARA MASYARAKAT LOKAL

I. Jadwal Wawancara

Hari/Tanggal :

Waktu Mulai dan Selesai :

Identitas Informan

Nama : Nur Ati

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 65 tahun

Pekerjaan : Tukang Jahit

II. Pertanyaan:

- 1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang dana desa dan bagaimana penggunaannya di Desa Rappoa?**

Jawaban: Iya saya tau soal dana desa. Setahu saya, dana itu dipakai untuk kegiatan di desa seperti bangun jalan, bagi-bagi sembako, dan membantu warga lewat program-program lainnya.

- 2. Apa manfaat yang Bapak/Ibu rasakan dari program-program yang dibiayai oleh dana desa?**

Jawaban: Manfaat yang saya rasakan dari dana desa itu salah satunya pembangunan jalan setapak. Dulu jalannya susah untuk dilewati tapi sekarang sudah lebih bagus.

- 3. Apakah pembangunan infrastruktur di desa, seperti jalan, fasilitas umum, atau layanan kesehatan, sudah mengalami peningkatan?**

Jawaban: Iya, saya merasakan ada peningkatan. Sekarang sudah ada jalan setapak, jadi akses lebih gampang. Ditambah juga ada poskesdes, jadi kalau mau berobat lebih dekat dan pelayanannya juga lebih baik.

4. Bagaimana dampak dana desa terhadap mata pencaharian atau usaha masyarakat di desa ini?

Jawaban: Menurut saya dampaknya baik, karena saya sendiri merasakan langsung mendapatkan bantuan mesin jahit dari dana desa. Sekarang saya bisa tambah penghasilan dari situ.

5. Apakah Bapak/Ibu merasa dilibatkan dalam musyawarah atau pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa?

Jawaban: Iya saya dilibatkan dalam musyawarah desa dan pengambilan keputusan. Jadi, kami sebagai warga bisa ikut menyampaikan pendapat dan mengetahui rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.

6. Menurut Bapak/Ibu, apakah dana desa sudah dikelola dengan baik dan transparan?

Jawaban: Menurut saya, dana desa sudah dikelola dengan baik. Karena, setiap musyawarah selalu dibacakan laporannya, dan informasinya juga dipajang di papan informasi, jadi warga bisa mengetahui dan ikut mengawas.

7. Apa kendala atau masalah yang masih dirasakan terkait penggunaan dana desa di desa ini?

Jawaban: Saya pribadi tidak merasakan kendala apa-apa terkait penggunaan dana desa semua berjalan lancar dan programnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat.

8. Apa harapan dan saran Bapak/Ibu agar dana desa lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

Jawaban: Harapan saya kedepannya, semoga kinerja dan pelayanan pemerintah desa bisa lebih ditingkatkan lagi.

WAWANCARA MASYARAKAT LOKAL

I. Jadwal Wawancara

Hari/Tanggal :

Waktu Mulai dan Selesai :

II. Identitas Informan

Nama : Mantasiah

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 44 tahun

Pekerjaan : Guru

III. Pertanyaan:

- 1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang dana desa dan bagaimana penggunaannya di Desa Rappoa?**

Jawaban: Iya, saya mengetahui penggunaan dana desa. Menurut saya, transparansinya sudah bagus karena disampaikan secara terbuka.

- 2. Apa manfaat yang Bapak/Ibu rasakan dari program-program yang dibiayai oleh dana desa?**

Jawaban: Sangat banyak, membantu masyarakat yang membutuhkan seperti alat untuk petani rumput laut, pertanian, dan pertukangan.

- 3. Apakah pembangunan infrastruktur di desa, seperti jalan, fasilitas umum, atau layanan kesehatan, sudah mengalami peningkatan?**

Jawaban: Iya mengalami peningkatan karena infrastruktur terealisasi, ditanggu lampu jalan, untuk ibu melahirkan dibiayai.

- 4. Bagaimana dampak dana desa terhadap mata pencaharian atau usaha masyarakat di desa ini?**

Jawaban: Bagus dari segi bantuan bisa membantu perekonomian masyarakat

5. **Apakah Bapak/Ibu merasa dilibatkan dalam musyawarah atau pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa?**

Jawaban: Iya, semua masyarakat dilibatkan

6. **Menurut Bapak/Ibu, apakah dana desa sudah dikelola dengan baik dan transparan?**

Jawaban: menurut saya sudah baik dan transparan, bahkan pernah diumumkan di mesjid dan pernah juga menjadi desa percontohan

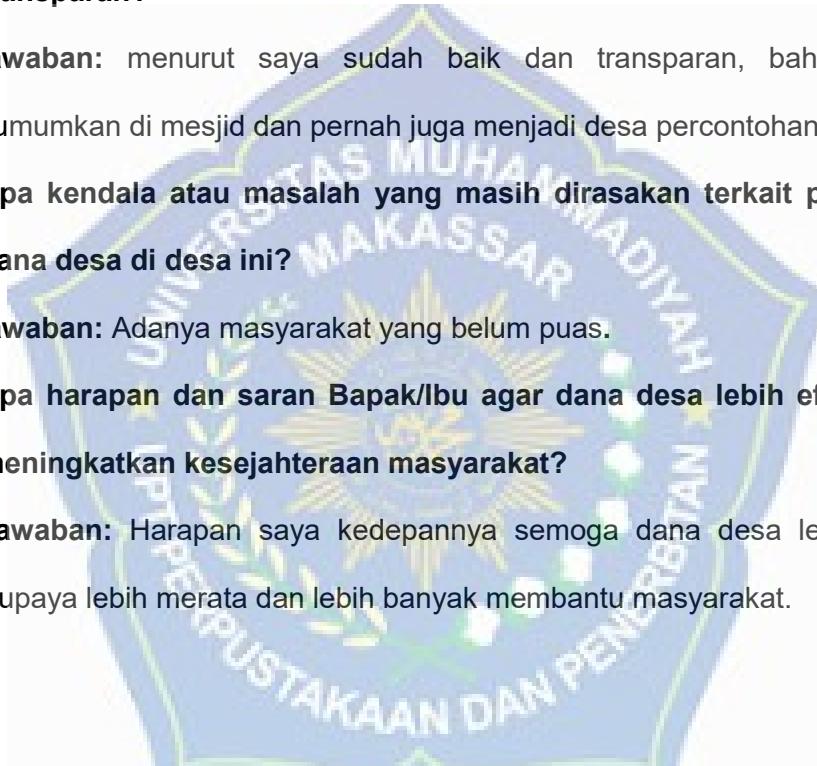
7. **Apa kendala atau masalah yang masih dirasakan terkait penggunaan dana desa di desa ini?**

Jawaban: Adanya masyarakat yang belum puas.

8. **Apa harapan dan saran Bapak/Ibu agar dana desa lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?**

Jawaban: Harapan saya kedepannya semoga dana desa lebih banyak.

Supaya lebih merata dan lebih banyak membantu masyarakat.



WAWANCARA TOKOH MASYARAKAT

I. Jadwal Wawancara

Hari/Tanggal :

Waktu Mulai dan Selesai :

II. Identitas Informan

Nama : Dian Hardianti

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 32 tahun

Pekerjaan : IRT (ibu rumah tangga)

III. Pertanyaan:

- 1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang dana desa dan bagaimana penggunaannya di Desa Rappoa?**

Jawaban: Saya sebagai warga desa sedikit mengetahui tentang dana desa.

- 2. Apa manfaat yang Bapak/Ibu rasakan dari program-program yang dibiayai oleh dana desa?**

Jawaban: Saya belum merasakan manfaatnya tapi sebagian warga difasilitasi untuk menjahit, tata boga, tata rias. sehingga bisa menghasilkan uang

- 3. Apakah pembangunan infrastruktur di desa, seperti jalan, fasilitas umum, atau layanan kesehatan, sudah mengalami peningkatan?**

Jawaban: Sudah mengalami peningkatan, setiap tahun itu pasti ada program terbaru seperti penyediaan lahan ternak sapi, kemudian lampu jalan setiap dusun itu sudah terang, wifi disetiap dusun.

- 4. Bagaimana dampak dana desa terhadap mata pencaharian atau usaha masyarakat di desa ini?**

Jawaban: saya sebenarnya sudah pernah mengajukan proposal bantuan untuk mendukung mata pencaharian saya, tapi sampai sekarang belum disetujui. Jadi sejauh ini, saya belum merasakan langsung dampak dana desa terhadap uaha atau pekerjaan saya.

5. Apakah Bapak/Ibu merasa dilibatkan dalam musyawarah atau pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa?

Jawaban: Iya, saya dilibatkan karena selalu diundang setiap kali ada musrembang (musyawarah Perencanaan pembangunan). Apalagi saya bergabung dalam PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga).

6. Menurut Bapak/Ibu, apakah dana desa sudah dikelola dengan baik dan transparan?

Jawaban: Ya, saya rasa pengelolaan dana desa sudah dilakukan dengan baik dan transparan. Bahkan, desa ini pernah dijadikan sebagai desa percontohan karena hal itu.

7. Apa kendala atau masalah yang masih dirasakan terkait penggunaan dana desa di desa ini?

Jawaban: Kendalanya itu karena dana desa terbatas, jadi pembagiannya belum merata. Setiap tahunnya tidak semua kelompok dapat bantuan sekaligus, tapi biasanya dibagi per kelompok. Misalnya, kelompok A dapat tahun ini, lalu kelompok B baru dapat tahun depan

8. Apa harapan dan saran Bapak/Ibu agar dana desa lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

Jawaban: Harapan saya semoga proposal saya di setujui karena 2 tahun yang lalu tidak disetujui, agar saya juga bisa punya kegiatan dirumah.

Lampiran Coding Wawancara

CODING WAWANCARA

1. Coding Indikator

- I : Berkomunikasi dengan pendengar
- I-A : Mempertimbangkan keinginan pendengar
- II : Memperkenalkan kanal di media social
- II-A : Mengajak pendengar untuk berkonsentrasi langsung

2. Codingkey Informan

- ID : Irwan Darfin (aparatur desa)
- HM : Husni Mubarak (aparatur desa)
- IM : Irwan Marzuki (aparatur desa)
- HJ : Hajrah (aparatur desa)
- MD : M. Nurdin (tokoh masyarakat)
- ST : Syamsuddin T (tokoh masyarakat)
- MW : Marwah (masyarakat lokal)
- BD : Badariah (masyarakat lokal)
- NA : Nur Ati (masyarakat lokal)
- MT : Mantasiah (masyarakat lokal)
- DH : Dian Hardianti (Masyarakat lokal)

LAMPIRAN CODING WAWANCARA**CODING WAWANCARA**

Kode : ID

Pekerjaan : Aparatur Desa

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	kami mengelola dana desa dengan transparan dan melibatkan masyarakat. Semua tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dilakukan bersama perangkat desa dan warga. Kami memastikan dana desa digunakan sesuai dengan rencana pembangunan agar manfaatnya tepat sasaran.	3	ID/I/1/3
I	Dalam beberapa tahun terakhir, kami memprioritaskan dana desa untuk pembangunan jalan, saluran irigasi, dan penyediaan air bersih. Selain itu, kami juga mengalokasikan dana untuk mendukung usaha kecil, pelatihan keterampilan warga, dan peningkatan fasilitas kesehatan seperti posyandu dan poskesdes.	10	ID/I/1/10
I	Masyarakat sangat berperan dalam penggunaan dana desa. Mereka ikut serta dalam musyawarah desa untuk menentukan program prioritas. Selain itu, mereka juga kami libatkan dalam pembangunan melalui sistem pada karya, sehingga selain mendapat manfaat dari pembangunan, mereka juga mendapatkan tambahan penghasilan.	16	ID/I/1/16
I	Beberapa kendala yang kami hadapi adalah kurangnya tenaga ahli dalam pengelolaan	22	ID/I/1/22

	keuangan desa, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta keterlambatan pencairan dana dari pemerintah pusat karena undang-undang yang tiba-tiba berubah. Hal ini tentu bisa menghambat jalannya program yang sudah direncanakan.		
I	Untuk menjaga transparansi, kami selalu mengadakan rapat terbuka dengan warga dan memasang informasi penggunaan dana di papan Informasi penggunaan dana. Selain itu, dana desa diaudit oleh pihak terkait untuk memastikan penggunaannya sesuai aturan.	30	ID/I/1/30
I	Dampak paling nyata dari dana desa adalah meningkatkannya akses warga ke jalan yang lebih baik, air bersih, layanan kesehatan dan pendidikan. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi juga sangat membantu meningkatkan pendapatan warga, terutama petani dan nelayan.	35	ID/I/1/35
I	Ke depannya, kami meningkatkan pelatihan bagi perangkat desa dalam mengelola keuangan dan perencanaan pembangunan. Selain itu, kami juga akan memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pengelolaan dana desa serta terus melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan agar manfaatnya lebih besar dan tepat sasaran.	42	ID/I/1/42

Kode : HM

Pekerjaan : Aparatur Desa

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang mempunyai tugas diantaranya mengkoordinasi Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan penyusunan rancangan APBDes serta Rancangan Perubahan APBDes, rancangan perkades tentang Penjabaran APBDes hingga sampai laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban, ini sesuai dengan topuksi sekdes yang tertuang dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 tepatnya dalam pasal 5 dan tugas lainnya sekdes melakukan Verifikasi terhadap dokumen lainnya seperti DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), RAK (Rencana Kerja Anggaran Desa) dan semua bukti penerimaan dan pengeluaran di APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).	6	HM/I/2/6
I	melaksanakan Musdes (Musyawarah Desa) perencanaan yang dilaksanakan oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) difasilitasi pemdes (pemerintah desa) harus melalui Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan, Pembentukan Tim Penyusun RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) untuk menyusun Rancangan RKPDes dan setelah ada rancangan dilanjutkan dengan Musdes	18	HM/I/2/18

	(Musyawarah Desa) pembahasan dan Musdes penetapan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dan setelah ada dokumen RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang telah disepakati maka dilanjutkan dengan Musdes (Musyawarah Desa) penyusunan Rancangan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dan setelah itu dilakukan Musdes (Musyawarah Desa) pembahasan tentang Rancangan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) tersebut dan setelah dilakukan pembahasan oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) maka dilanjutkan dengan Musdes (Musyawarah Desa) penetapan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), sebenarnya waktu/jadwal setiap tahapan itu sudah ada juknisnya.		
I	Dokumen administrasi yang disiapkan secara umum yang memuat perencanaan diantaranya Dokumen RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), Dokumen RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dan Dokumen APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).	36	HM/I/2/36
I	mengenai Koordinasi diantara perangkat Desa memang harus dan wajib saling bekerja sama tanpa melupakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.	42	HM/I/2/42
I	Sebenarnya mengenai tantangan dalam hal pengelolaan dana desa itu memang ada tapi tergantung kita sebagai perangkat desa	46	HM/I/2/46

	bagaimana kita menyiapkan tanggung jawab kita sebagai perangkat desa dalam hal pengelolaan dana desa.		
I	Mengenai mekanisme pelaporan penggunaan dana itu sudah ada alurnya yang telah ditentukan sesuai dengan prosedur dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan anggaran dan capaian atau output kepada Bupati di setiap tahapnya.	52	HM/I/2/52
I	Dalam hal aturan atau regulasi yang menjadi penghambat pengelolaan dana desa sebenarnya tidak ada yang signifikan karena yang menjadi kendala sebenarnya hanya dari segi perencanaan kegiatan yang skala prioritas yang mengharuskan desa harus menyesuaikan atau melakukan sinkronisas program kegiatan prioritas pemerintah pusat yang skala nasional.	58	HM/I/2/58

Kode : IM

Pekerjaan : Aparatur Desa

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Dana desa digunakan untuk berbagai program kesejahteraan, seperti bantuan sosial bagi warga kurang mampu, pembangunan posyandu dan poskesdes, penyediaan fasilitas air bersih, serta pelatihan keterampilan untuk meningkatkan ekonomi warga.	2	IM/I/3/2
I	dampaknya cukup besar, di bidang kesehatan, masyarakat kini lebih mudah mengakses layanan kesehatan dengan adanya posyandu dan poskesdes yang lebih baik dan disediakan obat-obatan pemeriksaan gratis. Di bidang pendidikan pemberian seragam sekolah untuk Paud/TK dan SD. Di bidang ekonomi pelatihan keterampilan, bantuan pompa pada petani, waring tali untuk untuk rumput laut dan, jaring nelayan tangkap.	9	IM/I/3/9
I	Masyarakat sangat aktif terlibat, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program. Kami selalu mengadakan musyawarah desa untuk mendengar masukan mereka. Selain itu, mereka juga turut serta dalam berbagai kegiatan, seperti pelatihan keterampilan dan program pada karya , yang memberikan manfaat ekonomi langsung. Gotong-royong saling bantu membantu misalnya menggerut irigasi budi daya rumput laut membuat jemuran rumput laut.	17	IM/I/3/17

I	tantangannya adalah cuaca misalnya dalam budi daya rumput laut contohnya musim hujan yang menyebabkan keterlambatan produksi.	24	IM/I/3/24
I	Kami terus berupaya mengoptimalkan penggunaan dana desa dengan fokus pada kebutuhan utama masyarakat. Support bantuan kegiatan desa di bidang pertanian solusi diberikan semua linik tanpa terkecuali tidak membeda-bedakan.	28	IM/I/3/28
I	salah satu bentuk inovasi yang diterapkan dalam penggunaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat yaitu di bidang pertanian berupa program pembagian pestisida untuk mencegah hama, dan program pupuk subsidi.	34	IM/I/3/34
I	Secara umum, program-program kesejahteraan desa berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif. Seperti peningkatan ekonominya dari menengah kebawah menjadi menengah ke atas. Namun, ada beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan, seperti pemantauan jangka panjang terhadap para nelayan yang masih kurang dijangkau oleh bantuan dana desa. Kami terus melakukan evaluasi dan memperbaiki kekurangan agar kesejahteraan semakin efektif dan tepat sasaran.	39	IM/I/3/39

Kode : HJ

Pekerjaan : Aparatur Desa

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	pengelolaan keuangan dana desa dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dilakukan dengan melibatkan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Semua anggaran disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang ditetapkan setiap tahun.	2	HJ/I/4/2
I	Selain dana desa dari pemerintah pusat, Desa Rappoa juga memperoleh pendapatan dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) kabupaten, Pendaapatan Asli Desa (PAD) seperti hasil usaha desa dan retribusi, serta bantuan keuangan dari pemerintah provinsi maupun hibah dari pihak lain.	9	HJ/I/4/9
I	Dana desa dicairkan secara bertahap sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Setiap pencairan harus melalui proses administrasi, termasuk penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sebelumnya. Setelah dana cair, penggunaannya harus sesuai dengan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), serta	15	HJ/I/4/15

	diawasi oleh pihak terkait.		
I	Kami menggunakan sistem administrasi keuangan desa berbasis aplikasi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Setiap transaksi keuangan dicatat secara rinci, dan laporan keuangan dibuat secara berkala. Laporan ini kemudian diaudit oleh ispektorat Kabupaten dan disampaikan kepada masyarakat melalui musyawarah desa sebagai bentuk transparansi.	22	HJ/I/4/22
I	Dengan adanya sistem peraturan yang secara dinamis (tidak tetap) dari pemerintah pusat, yang menjadi kendala atau memperlambat akan realisasinya program-program yang sudah di rencanakan oleh para pihak aparat Desa. Dalam hal ini program-program yang sebelumnya sudah di susun oleh aparat Desa dapat berubah dan menyesuaikan kembali dengan dana Desa yang di salurkan. Meskipun dengan adanya kendala tersebut tidak menjadi suatu halangan untuk membuat Desa yang Asri dan Nyaman.	28	HJ/I/4/28
I	Kami menerapkan sistem transparansi dengan menyampaikan laporan keuangan kepada asyarakat secara terbuka. Selain itu, ada pengawasan dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa), pendamping desa, serta ispektorat Kabupaten. Setiap penggunaan dana juga harus memiliki bukti yang jelas agar tidak terjadi penyimpangan.	36	HJ/I/4/36
I	Evaluasi dilakukan setiap pencairan 4 bulan sekali melalui pelaporan	42	HJ/I/4/42

	pertanggungjawaban tahunan yang disusun oleh pemerintah desa dan dibahas dalam musyawarah desa. Hasil evaluasi ini digunakan untuk memperbaiki pengelolaan dana desa di tahun berikutnya, memastikan program yang kurang efektif tidak lagi dianggarkan, dan meningkatkan kualitas penggunaan anggaran.		
I	Tahap penatausahaan yang dilakukan yaitu saya bertanggungjawab dalam pencatatan pendapatan dan dana yang dikeluarkan untuk pembangunan. jadi saya membuat laporan itu setiap bulan yang nantinya akan disampaikan dalam forum penyampaian LPJ atau laporan dan pertanggungjawaban.	49	HJ/I/4/49



Kode : MD

Pekerjaan : Tokoh Masyarakat

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Sampai saat ini, pengelolaan dana desa di Desa Rappoa sudah berjalan dengan baik. Program yang dirancang juga sudah dilaksanakan dan manfaatnya dirasakan oleh warga.	3	MD/I/5/3
I	Iya, masyarakat tetap dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan melalui musyawarah desa (musdes). Dalam ini, setiap warga bisa menyampaikan usulan dan memberikan masukan terkait penggunaan dana desa.	8	MD/I/5/8
I	Dampaknya cukup signifikan dan sesuai dengan perencanaan. Salah satu contohnya adalah pembangunan jalan setapak yang sangat membantu mobilitas warga terutama nelayan dan petani.	13	MD/I/5/13
I	pengaruhnya cukup bagus. Karena membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah desa rutin memberikan bantuan yang sifatnya meningkatkan ekonomi warga seperti tali temali, pelampung untuk petani rumput laut. Untuk nelayan tangkap diberikan mesin dan jaring sedangkan untuk petani sawah diberikan bantuan pompa penyemprot hama, bantuan bibit, untuk pertukangan diberikan bantuan alat pertukangan, untuk tukang jahit diberikan bantuan mesin jahit, untuk tukang kayu diberikan alat.	18	MD/I/5/18

I	saya merasa program dana desa sudah tepat sasaran. Program yang dijalankan memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat yang nyata.	26	MD/I/5/26
I	Tantangan utama adalah adanya program dari pemerintah pusat yang kadang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Harus ada penyesuaian agar lebih bermanfaat bagi warga desa.	30	MD/I/5/30
I	Sejauh ini tidak ada kendala atau dugaan penyalahgunaan dana desa. Semua penggunaan dana desa diawasi dengan baik oleh pemerintah desa dan masyarakat.	34	MD/I/5/34
I	Saya berharap pemerintah desa lebih semakin meningkatkan pelayanan dasar masyarakat dengan memprioritaskan program-program dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat dan, infrastuktur.	39	MD/I/5/39

Kode : ST

Pekerjaan : Tokoh Masyarakat

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Menurut saya, pengelolaan dana desa di Desa Rappoa sudah cukup baik, bantuan yang diberikan dari dana desa sudah tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal mendukung kegiatan sehari-hari dan pembangunan desa.	3	ST/I/6/3
I	Iya dilibatkan,karena saya sebagai kepala dusun selalu diminta untuk memaksimalkan musdus (musyawarah dusun) terkait susulan penyusunan program yang dibutuhkan masyarakat setiap tahunnya kegiatan ini biasanya dilakukan dirumah saya sebagai kepala dusun.	9	ST/I/6/9
I	Dampak dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa sangat banyak karena program-program yang dilaksanakan desa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama kelompok-kelompok seperti disabilitas, kepala keluarga, lansia, dan prasejahtera.	14	ST/I/6/14
I	sangat baik karena beberapa warga saya rutin mendapatkan bantuan untuk usahanya bantuan tali bentang, induk, pelampung, perahu, mesin, pompa hama.	20	ST/I/6/20
I	Cukup merata karena setiap tahun itu dilaksanakan program-program prioritas disetiap dusun yang ada di Desa Rappoa.	24	ST/I/6/24
I	Tantangan saya sebagai kepala dusun yaitu	27	ST/I/6/27

	menghadirkan warga dalam proses Musdus (Musyawara Dusun) sebagai pengawas sesuai mutu dan volume harus sesuai		
I	Setau saya sebagai kepala dusun tidak ada karena selama 15 tahun saya mendampingi kepala desa tidak pernah ada satupun pelanggaran yang dilakukan pemerintah desa.	31	ST/I/6/31
I	Harapan saya sebagai kepala dusun yaitu dana desa dari pusat ditambah, dan saran saya yaitu pemerintah desa mempertahankan prosedur penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa yang memegang prinsip good governance yang mengedepankan prinsip partisipatif, transparan dan akuntabel.	36	ST/I/6/36



Kode : MW

Pekerjaan : Masyarakat Lokal

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Saya tidak terlalu mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Rappoa karena kurangnya informasi yang sampai kepada masyarakat.	3	MW/I/7/3
I	Saya pribadi belum pernah dilibatkan dalam musyawarah desa atau kegiatan perencanaan dana desa. Sejauh ini, keterlibatan masyarakat masih kurang.	7	MW/I/7/7
I	Saya merasa belum melihat pemerataan dalam pembangunan infrastruktur desa. Masih ada beberapa titik yang membutuhkan perbaikan jalan dan fasilitas lainnya.	11	MW/I/7/11
I	Menurut saya, kesejahteraan masyarakat lokal lebih banyak bergantung pada usaha pribadi masing-masing, bukan dari program desa.	16	MW/I/7/16
I	saya rasa belum ada pemerataan yang jelas dalam penggunaan dana desa. Masih ada bagian masyarakat yang belum menerima manfaatnya secara langsung.	19	MW/I/7/19
I	kurangnya transparansi dan keterlibatan masyarakat menjadi tantangan utama dalam pengelolaan dana desa.	23	MW/I/7/23
I	setau saya, tidak pernah ada kpenyalahgunaan dana desa karena semua penggunaanya terpajang dipapan informasi, jadi kami sebagai warga bisa tau.	26	MW/I/7/26
I	Harapan saya ke depan, pembagian	31	MW/I/7/31

	bantuan seperti sembako bisa lebih merata, jangsn sampai ada yang dilewatkan. Selain itu, pelayanan kesehatan juga sebaiknya lebih dimudahkan, supaya semua warga bisa mengaksesnya tanpa kesulitan.		
--	--	--	--



Kode : BD

Pekerjaan : Masyarakat Lokal

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Sejauh ini saya belum terlalu banyak mendapat penjelasan terkait pengelolaan dana desa, jadi saya tidak terlalu mengikuti perkembangannya.	3	BD/I/8/3
I	Sampai sekarang, saya belum pernah merasakan langsung manfaat dari program-program dana desa. Mungkin karena tidak semua warga ikut terlibat atau dapat bantuan atau programnya belum sesuai dengan kebutuhan saya.	7	BD/I/8/7
I	Kalau soal jalanan, sampai sekarang belum ada peningkatan atau perbaikan jadi masih rusak. Tapi kalau soal pelayanan kesehatan saya sudah mulai merasakan peningkatan, lebih mudah dan cepat dibanding dulu.	14	BD/I/8/14
I	setau saya pribadi, banyak petani belum menerima bantuan alat pertanian, kalau ada pun, berarti pembagiannya belum merata, jadi masih ada petani yang merasa tidak diperhatikan.	19	BD/I/8/19
I	Saya belum dilibatkan langsung dalam musyawarah desa atau kegiatan yang berkaitan dengan dana desa. Jadi saya juga tidak terlalu paham tentang pengelolaannya.	24	BD/I/8/24
I	Menurut saya pribadi sudah dikelola dengan baik dan transparansi karena selama ini informasi soal dana desa biasanya ditempel di papan informasi, jadi warga bisa lihat langsung apa saja kegiatan atau bantuan	29	BD/I/8/29

	yang ada.		
I	Kendala yang saya rasakan selama ini adalah pembagian bantuan yang belum merata. Ada warga yang sering dapat, tapi ada juga yang belum pernah dapat, padahal sama-sama membutuhkan.	35	BD/I/8/35
I	Harapan dan saran saya ke depan, semoga pembagian bantuan dari dana desa bisa lebih merata, supaya semua warga yang membutuhkan bisa merasakannya tanpa ada yang tertinggal.	40	BD/I/8/40



Kode : NA

Pekerjaan : Masyarakat Lokal

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Iya saya tau soal dana desa. Setahu saya, dana itu dipakai untuk kegiatan di desa seperti bangun jalan, bagi-bagi sembako, dan membantu warga lewat program-program lainnya.	3	NA/I/9/3
I	Manfaat yang saya rasakan dari dana desa itu salah satunya pembangunan jalan setapak. Dulu jalanannya susah untuk dilewati tapi sekarang sudah lebih bagus.	8	NA/I/9/8
I	Iya, saya merasakan ada peningkatan. Sekarang sudah ada jalan setapak, jadi akses lebih gampang. Ditambah juga ada poskesdes, jadi kalau mau berobat lebih dekat dan pelayanannya juga lebih baik.	13	NA/I/9/13
I	Menurut saya dampaknya baik, karena saya sendiri merasakan langsung mendapatkan bantuan mesin jahit dari dana desa. Sekarang saya bisa tambah penghasilan dari situ.	18	NA/I/9/18
I	Iya saya dilibatkan dalam musyawarah desa dan pengambilan keputusan. Jadi, kami sebagai warga bisa ikut menyampaikan pendapat dan mengetahui rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.	23	NA/I/9/23
I	Menurut saya, dana desa sudah dikelola dengan baik. Karena, setiap musyawarah selalu dibacakan laporannya, dan informasinya juga dipajang di papan informasi, jadi warga bisa mengetahui dan	28	NA/I/9/28

	ikut mengawas.		
I	Saya pribadi tidak merasakan kendala apa-apa terkait penggunaan dana desa semua berjalan lancar dan programnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat.	33	NA/I/9/33
I	Harapan saya kedepannya, semoga kinerja dan pelayanan pemerintah desa bisa lebih ditingkatkan lagi.	38	NA/I/9/38



Kode : MT

Pekerjaan : Masyarakat Lokal

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Iya, saya mengetahui penggunaan dana desa. Menurut saya, transparansinya sudah bagus karena disampaikan secara terbuka.	3	MT/I/10/3
I	Sangat banyak, membantu masyarakat yang membutuhkan seperti alat untuk petani rumput laut, pertanian, dan pertukangan.	7	MT/I/10/7
I	Iya mengalami peningkatan karena infrastruktur terealisasi, ditangguh lampu jalan, untuk ibu melahirkan dibiayai.	11	MT/I/10/11
I	Bagus dari segi bantuan langsung tunai bisa membantu perekonomian masyarakat.	15	MT/I/10/15
I	Iya, semua masyarakat dilibatkan.	19	MT/I/10/19
I	menurut saya sudah baik dan transparan, bahkan pernah diumumkan di mesjid dan pernah juga menjadi desa percontohan.	22	MT/I/10/22
I	Adanya masyarakat yang belum puas.	25	MT/I/10/25
I	Harapan saya kedepannya semoga dana desa lebih banyak. Supaya lebih merata dan lebih banyak membantu masyarakat.	28	MT/I/10/28

Kode : DH

Pekerjaan : Masyarakat Lokal

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Saya sebagai warga desa sedikit mengetahui tentang dana desa.	3	DH/I/11/3
I	Saya belum merasakan manfaatnya tapi sebagian warga difasilitasi untuk menjahit, tata boga, tata rias. sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.	6	DH/I/11/6
I	Sudah mengalami peningkatan, setiap tahun itu pasti ada program terbaru seperti penyediaan lahan ternak sapi, kemudian lampu jalan setiap dusun itu sudah terang, wifi disetiap dusun.	11	DH/I/11/11
I	saya sebenarnya sudah pernah mengajukan proposal bantuan untuk mendukung mata pencaharian saya, tapi sampai sekarang belum disetujui. Jadi sejauh ini, saya belum merasakan langsung dampak dana desa terhadap uaha atau pekerjaan saya.	16	DH/I/11/16
I	Iya, saya dilibatkan karena selalu diundang setiap kali ada musrembang (musyawarah Perencanaan pembangunan). Apalagi saya bergabung dalam PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga).	22	DH/I/11/22
I	Ya, saya rasa pengelolaan dana desa sudah dilakukan dengan baik dan transparan. Bahkan, desa ini pernah dijadikan sebagai desa percontohan karena hal itu.	27	DH/I/11/27
I	Kendalanya itu karena dana desa terbatas, jadi pembagiannya belum merata. Setiap tahunnya tidak semua kelompok dapat	32	DH/I/11/32

	bantuan sekaligus, tapi biasanya dibagi per kelompok. Misalnya, kelompok A dapat tahun ini, lalu kelompok B baru dapat tahun depan		
I	Harapan saya semoga proposal saya di setujui karena 2 tahun yang lalu tidak disetujui, agar saya juga bisa punya kegiatan dirumah.	38	DH/I/11/38



TABEL**Rangkuman Hasil Wawancara**

No.	Aspek/Indikator	Hasil Wawancara	Pelaksanaan
Efisiensi Penggunaan Dana Desa			
1	Penggunaan dana Sesuai dengan perencanaan	Dana desa digunakan sesuai hasil musrenbangdes dan disesuaikan dengan prioritas RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) tahunan seperti pembangunan jalan, listrik, air bersih.	Terlaksana
2	Dana digunakan untuk kegiatan produktif	Dana digunakan untuk pengembangan usaha ekonomi seperti pertanian, perikanan, pariwisata, serta industri kecil seperti pandai besi dan penjualan kayu.	Terlaksana Sebagian
3	Hasil kegiatan sebanding dengan anggaran	Sebagian kegiatan yang didanai sudah memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan, seperti pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, masih ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya belum menunjukkan manfaat	Terlaksana Sebagian

		besar secara ekonomi, sehingga belum dirasakan langsung oleh sebagian warga	
4	Efektivitas pelaksanaan kegiatan	Program pelaksanaan sesuai jadwal, namun sering terhambat oleh keterlambatan pencairan dana atau hambatan cuaca	Terlaksana Sebagian
5	Mekanisme monitoring dan pengawasan anggaran	Monitoring dilakukan oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan tim desa dengan mengacu pada prinsip transparansi, namun pengawasan belum menyeluruh dan laporan belum berbasis evaluasi kinerja.	Tidak Terlaksana Maksimal
Dampak Pengelolaan Dana Desa			
6	Dampak terhadap pembangunan	Kantor pemerintahan desa, layanan kesehatan berupa infrastruktur desa poskesdes (Pos Kesehatan Desa) dan posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), sarana olahraga, tempat ibadah, jalan desa, jaringan listrik dan telekomunikasi, serta prasarana air bersih.	Terlaksana

7	Dampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat	Pelatihan dan bantuan ekonomi dilakukan, tetapi belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.	Terlaksana Sebagian
8	Dampak pada pelayanan publik	Akses terhadap layanan kesehatan, pemerintahan, dan sosial meningkat.	Terlaksana
9	Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan	Masyarakat sering terlibat dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Meski demikian tingkat partisipasi dapat bervariasi tergantung pada jenis kegiatan	Terlaksana Sebagian
Kendala dalam implementasi dana			
10	Sistem peraturan yang bersifat dinamis (tidak tetap)	Dengan adanya sistem peraturan yang secara dinamis (tidak tetap) dari pemerintah pusat, yang menjadi kendala atau memperlambat akan realisasinya program-program yang sudah di rencanakan oleh para pihak aparat Desa. Dalam hal ini program-program yang	Terlaksana

		<p>sebelumnya sudah di susun oleh aparat Desa dapat berubah dan menyesuaikan kembali dengan dana Desa yang di salurkan. Meskipun dengan adanya kendala tersebut tidak menjadi suatu halangan untuk membuat Desa yang Asri dan Nyaman.</p>	
Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa			
11	Memasang informasi penggunaan dana di papan informasi	<p>Memberikan informasi terkait penyaluran dana Desa ke Masyarakat dengan cara Memasang Papan Informasi sehingga Masyarakat menilai dana Desa cukup baik dan Transparansi. Namun tidak semua warga dapat memahami laporan yang dilampirkan di papan informasi.</p>	<p>Terlaksana Sebagian</p>
12	Audit keuangan oleh instansi terkait	Dalam hal ini dengan adanya pelaksanaan Audit keuangan oleh instansi terkait yaitu para perangkat desa dan anggota BPD (Badan Permusyawaratan	

		Desa) agar Masyarakat bisa memahami lebih jelas tentang pengelolaan dana Desa tersebut, namun tidak dilibatkannya warga.	Terlaksana Sebagian
13	Mengadakan rapat terbuka dengan warga	Dengan diadakannya rapat terbuka dengan warga guna tidak adanya kesenjangan dalam pengelolaan dana Desa tersebut, sehingga warga atau Masyarakat dapat memberikan respon positif terhadap Desa.	Terlaksana



LAMPIRAN PERSURATAN





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
NOMOR. 185 TAHUN 1445 H/ 2024 M

Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI & KTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ANGKATAN 2021 TAHAP I
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pembimbingan skripsi dan KTI mahasiswa angkatan 2021 Tahun Akademik 2023/2024 dipandang perlu mengangkat dosen Pembimbing pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Mengingat : 1. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2022
 2. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021
 3. Peraturan Akademik Tahun 2021
 4. Pedoman Akademik Tahun 2021
- Memperhatikan : Surat Pengusulan Pembimbing dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor: 002/05/A.2-II/VII/45/2024 Perihal Data Dosen Pembimbing Skripsi dan KTI Mahasiswa FEB Tahap I Tahun Akademik 2023/2024
- Dengan Memohon Inayah Allah SWT
 Memutuskan
- Menetapkan Pertama : Mengangkat saudara yang tercantum namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagai dosen pembimbing skripsi dan KTI pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar tahun akademik 2023/2024.
- Kedua : Lampiran pada Surat Keputusan ini adalah bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Rektor.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Makassar
 Pada Tanggal: 2 Muharram 1446 H
 8 Juli 2024 M



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag

Tembusan:

1. Ketua BPH Unismuh Makassar
2. Wakil Rektor 1 Unismuh Makassar
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unismuh Makassar
4. Kepala Biro AAKSI dan AUKS Unismuh Makassar
5. Arsip

Alamat: Jalan Sultan Alauddin Nomor 259, Makassar, Sulawesi Selatan 90222
 Telepon: (0411) 866972, 881 593, Fax: (0411) 865 588
 Email: rektorat@unismuh.ac.id / info@unismuh.ac.id / Website: unismuh.ac.id



Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
Nomor : 185 TAHUN 1445 H/ 2024 M
Tentang : Pengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi & KTI FEB Angkatan 2021
Tahap I Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun Akademik 2023/2024

Nama Mahasiswa dan Dosen Pembimbing I & II Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas
Muhammadiyah Makassar Angkatan 2021 Tahap I Tahun Akademik 2023/2024

Nama : SITI FAUZIAH
Stambuk : 105731119121
Program Studi : Public Sector Accounting and taxation (PA)
Pembimbing I : Dr. Syamsuddin, S.Pd.,M.Ak
Pembimbing II : Endang Winarsih, SE.,M.Ak

Judul : Tinjauan Kebijakan Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya
Skripsi : Terhadap Masyarakat Lokal di Kabupaten Bulukumba



Dipindai dengan CamScanner





**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

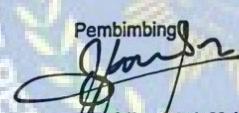
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penitian	:	Analisis Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Lokal Di Desa Rappoa Kabupaten Bantaeng
Nama Mahasiswa	:	Siti Fauziah
No. Stambuk/NIM	:	105731119121
Program Studi	:	Akuntansi
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi	:	Universitas Muhammadiyah Makassar
Telah disetujui dan diseminarkan pada Tanggal 16 Januari 2025 dan telah melakukan perbaikan.		

Makassar, 10 Maret 2025

Menyetujui

Pembimbing I

Dr. Syamsuddin, S.Pd.,M.Ak

NIDN: 0909107902

Pembimbing II

Endang Winarsih, SE.,M.Ak

NIDN: 0913029101



Mengetahui
Kejujuran Program Studi Akuntansi
Dr. Mira, SE, M.Ak.,Ak
NBM: 1286 844



Dipindai dengan CamScanner



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 066972 Fax (0411) 865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 6577/05/C.4-VIII/III/1446/2025

18 March 2025 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

18 Ramadhan 1446

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di –

Makassar

أنت تحيى بروح العرش وتحل في كل أرض

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 476/05/4.2.II/III/46/2025 tanggal 13 Maret 2025, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : SITTI FAUZIAH

No. Stambuk : 10573 1119121

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT LOKAL DI DESA RAPPOA KABUPATEN BANTAENG"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 20 Maret 2025 s/d 20 Mei 2025.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullah khaeran

أنت تحيى بروح العرش وتحل في كل أرض



Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan
 CamScanner



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Sitti Fauziah

Nim : 105731119121

Program Studi : Akuntansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10%	10 %
2	Bab 2	23%	25 %
3	Bab 3	10%	10 %
4	Bab 4	6%	10 %
5	Bab 5	5%	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 27 Agustus 2025
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

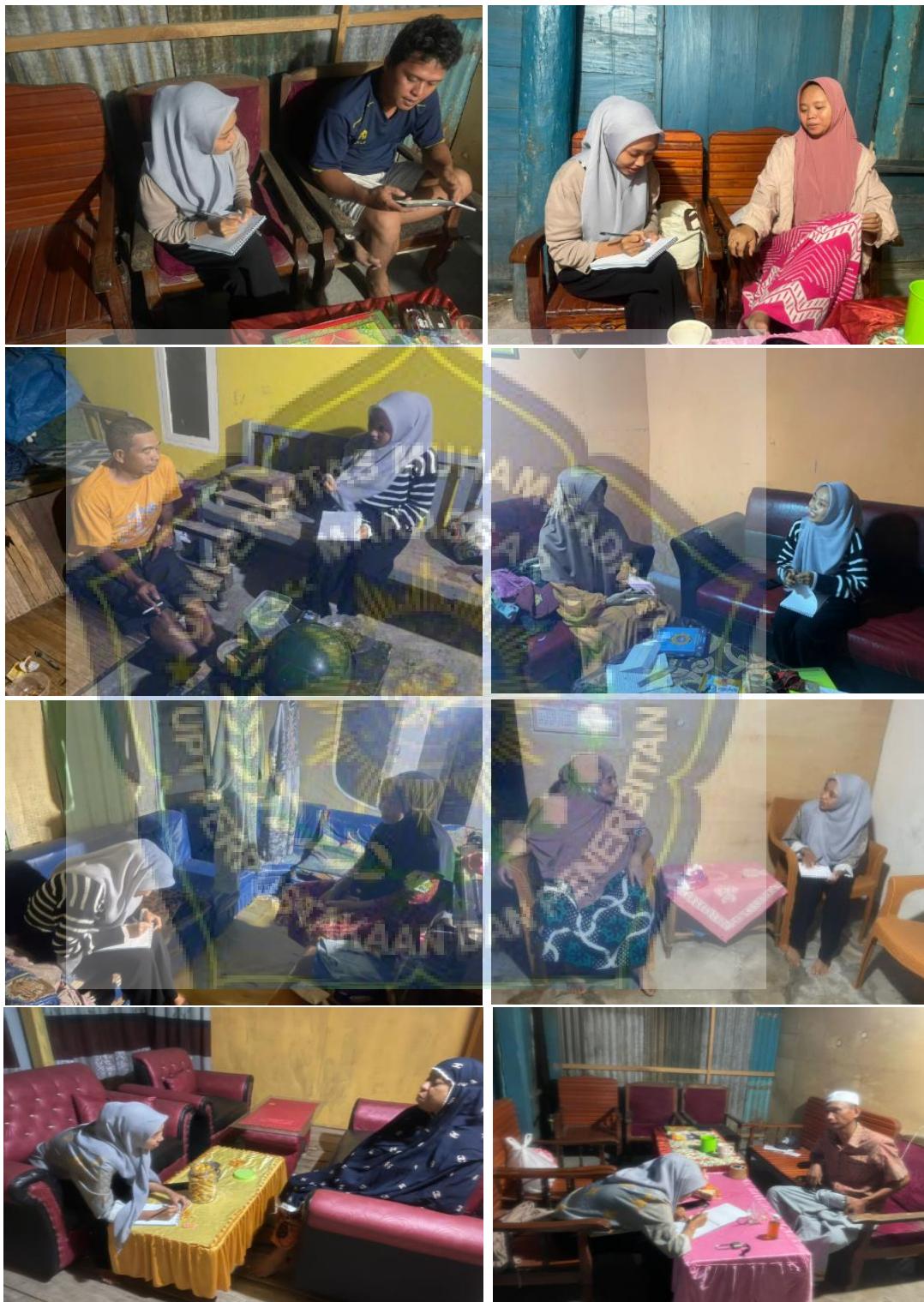


Nur Syirnah, Libram, M.I.P.
NBM: 964 591

LAMPIRAN DOKUMENTASI



DOKUMENTASI WAWANCAR DENGAN APARATUR DESA RAPPOA

DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT DESA RAPPOA

DOKUMENTASI PROGRAM-PROGRAM YANG DILAKUKAN DESA RAPPOA



BIOGRAFI PENULIS



Sitti Fauziah, panggilan Fauziah lahir di Bulukumba, 08 Juni 2003 dari pasangan suami istri Bapak Syarifuddin dan Ibu Sirka. Peneliti adalah anak tunggal. Saat ini, peneliti berdomisili di Pallangga, Kel Parangbanoa, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.

Riwayat pendidikan peneliti dimulai di SDN 183 Garanta dan lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan ke MTS Badan Amal Ujung loe dan lulus pada tahun 2018 serta menamatkan pendidikan di SMAN 9 Bulukumba pada tahun 2021, dan mulai tahun 2021 mengikuti program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan Skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar